

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TINGKAT  
PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI  
PULAU JAWA TAHUN 2011-2017  
(Studi Kasus Pada 118 Kabupaten/Kota)**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**Febrinia Rahma Atu Fitria**

**145020101111023**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2018**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2011-2017  
(Studi Kasus pada 118 Kabupaten/Kota)"**

Yang disusun oleh :

Nama : Febrinia Rahma Atu Fitria  
NIM : 145020101111023  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **13 November 2018** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.St.  
NIP. 19631116 199002 1 001  
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.  
NIP. 19550322 198103 1 002  
(Dosen Penguji I)
3. Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev., Ph.D.  
NIP. 19860801 201504 1 004  
(Dosen Penguji II)



Malang, 20 November 2018  
Ketua Program Studi  
Perencanaan Pembangunan,

Dr. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.  
NIP. 19650311 198903 2 001

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia,  
dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa  
Tahun 2011-2017  
(Studi Kasus pada 118 Kabupaten/Kota)**

Yang disusun oleh :

Nama : Febrinia Rahma Atu Fitria  
NIM : 145020101111023  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Malang, 31 Oktober 2018  
Mengetahui,

Dosen Pembimbing,



Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

**Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.**  
NIP. 19650311 198903 2 001

**Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.**  
NIP. 19631116 199002 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Febrinia Rahma Atu Fitria**  
Tempat, tanggal lahir : **Kediri, 14 Februari 1996**  
NIM : **145020101111023**  
Jurusan : **S1 Ilmu Ekonomi**  
Konsentrasi : **Perencanaan Pembangunan**  
Alamat : **Jl. Kertopamuji No. 27 Lowokwaru, Kota Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan  
Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2011-  
2017**


**(Studi Kasus pada 118 Kabupaten/Kota)**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,



Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.  
NIP. 19631116 199002 1 001

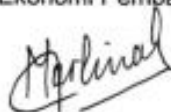
Malang, 31 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Febrinia Rahma Atu Fitria  
NIM. 145020101111023

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan,



Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.  
NIP. 19650311 198903 2 001



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Febrinia Rahma Atu Fitria  
NIM : 145020101111023  
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 14 Februari 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Blabak RT/RW 001/002 Ds. Blabak  
Kec. Kandat Kab. Kediri  
Nomor Telepon/HP : 081219714901  
Email : febriniaaq14@gmail.com



### Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Blabak 1 Kandat Kabupaten Kediri (2002 – 2008)
- SMP Negeri 7 Kediri (2008 – 2011)
- SMA Negeri 4 Kediri (2011 – 2014)
- S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Brawijaya Malang (2014 – 2018)

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP  
TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA TAHUN 2011-2017  
(Studi Kasus Pada 118 Kabupaten/Kota)**

**Febrinia Rahma Atu Fitria**

febriniaaq14@gmail.com

**ABSTRAK**

*Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban, sehingga semua pihak sepakat bahwa upaya menekan sampai dengan menuntaskan kemiskinan harus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017, dengan studi kasus pada 118 Kabupaten/Kota. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (Simreg) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Teknik analisis yang dipergunakan adalah metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya adanya pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyentuh sedikit pada kesejahteraan masyarakat miskin. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.*

**Kata kunci:** *Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Metode Analisis Regresi Data Panel.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan Skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 (Studi Kasus pada 118 Kabupaten/Kota)**”. Penyusunan skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi, penulis mendapatkan banyak doa, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak karena pada hakikatnya manusia tercipta untuk saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam bagi beberapa pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ayah dan Ibu penulis, **Imam Mahmudi** dan **Sri Anik** yang telah sabar dalam segala hal dan mendukung penuh setiap langkah yang diambil penulis dalam proses akademik. Tidak lupa Kakek dan Nenek tercinta, **Sarpan** dan **Karminem** yang telah mengasuh penulis dari umur 4 tahun sampai dengan sekarang dan yang sangat menyayangi penulis lebih dari pada seorang anak. **Nanik** dan **Yusuf** selaku tante dan om penulis, yang selalu memberikan pelajaran dalam hidup penulis untuk menjadi seorang yang selalu sabar dan kuat. Saudara-saudara penulis **Izza, Risky, Arya, Juna, Adam, Yunda**, dan **Anggun**, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam segala hal. ThankYou SO MUCH.

2. Bapak **Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, saran, rekomendasi, dan bimbingan, bahkan waktu serta tenaga dalam penyusunan Skripsi ini;
3. Bapak **Prof. Dr. Maryunani, SE., MS.** dan Bapak **Nugroho Suryo Bintoro, SE., M.Ec.Dev., Ph.D.** selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan untuk skripsi ini;
4. Bapak **Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Bapak **Dr.rer.pol. Wildan Syafitri, SE. ME.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Ibu **Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan;
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta Karyawan/Karyawati Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu dalam administrasi akademi penulis;
6. **Sahabat** seperjuangan;
7. Keluarga Besar Ekonomi Pembangunan 2014; dan
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu di sini.

Semoga segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Aamiin.

Malang, 20 November 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LAMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	12
2.1.1 Konsep Kemiskinan .....	12
2.1.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi .....	16
2.1.3 Konsep Indeks Pembangunan Manusia .....	22
2.1.4 Konsep Pengangguran .....	26
2.2 Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen .....	28
2.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan .....	28
2.2.2 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan .....	30
2.2.3 Hubungan antara Pengangguran dan Kemiskinan .....	31
2.3 Penelitian Terdahulu .....	33
2.4 Kerangka Pikir Penelitian .....	36
2.5 Hipotesis Penelitian .....	38

**BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Metode Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data .....	42
3.3 Identifikasi Variabel Penelitian .....	43
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian .....	43
3.5 Metode Analisis Data .....	44
3.5.1 Penentuan Model .....	47
3.5.2 Metode Pemilihan Model .....	47
3.5.3 Uji Statistik .....	48

**BAB IV PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	50
4.1.1 Gambaran Umum Pulau Jawa .....	50
4.1.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan .....	52
4.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi .....	62
4.1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia .....	64
4.1.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka .....	66
4.2 Hasil Penelitian .....	68
4.2.1 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	68
4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel .....	71
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	72
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan .....	73
4.3.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan .....	79
4.3.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan .....	81

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Saran .....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....</b>	<b>7</b>
Tabel 1.2:	<b>Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa Menurut Provinsi Tahun 2017 (Persen) .....</b>	<b>7</b>
Tabel 2.1:	<b>Metode Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....</b>	<b>26</b>
Tabel 2.2:	<b>Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>33</b>
Tabel 4.1:	<b>Wilayah Administratif dan Jumlah Penduduk Pulau Jawa Tahun 2017 .....</b>	<b>51</b>
Tabel 4.2:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....</b>	<b>54</b>
Tabel 4.3:	<b>Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....</b>	<b>63</b>
Tabel 4.4:	<b>Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHK 2010 Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....</b>	<b>63</b>
Tabel 4.5:	<b>Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....</b>	<b>66</b>
Tabel 4.6:	<b>Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....</b>	<b>67</b>
Tabel 4.7:	<b>Kesimpulan Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel ....</b>	<b>70</b>
Tabel 4.8:	<b>Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) Metode Panel EGLS (<i>Cross-section weights</i>) .....</b>	<b>71</b>
Tabel 4.9:	<b>Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pulau Jawa Tahun 2017 (Persen) .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1:	<b>Kontribusi Menurut Pulau Terhadap PDB Tahun 2017...</b>	<b>4</b>
Gambar 1.2:	<b>Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2017 (Juta Jiwa) .....</b>	<b>5</b>
Gambar 1.3:	<b>Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dan Pulau Jawa Tahun 2011-2017 (Juta Jiwa) .....</b>	<b>6</b>
Gambar 1.4:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2017 .....</b>	<b>8</b>
Gambar 2.1:	<b>Lingkaran Perangkap Kemiskinan .....</b>	<b>15</b>
Gambar 2.2:	<b>Kerangka Pemikiran Teoretis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan .....</b>	<b>30</b>
Gambar 2.3:	<b>Kerangka Pikir Penelitian .....</b>	<b>36</b>
Gambar 2.4:	<b>Gambaran Hipotesis Penelitian .....</b>	<b>38</b>
Gambar 3.1:	<b>Tahapan Pendekatan <i>Applied Research</i> atau Pendekatan Kuantitatif .....</b>	<b>41</b>
Gambar 4.1:	<b>Luas Wilayah Administratif Pulau Jawa .....</b>	<b>51</b>
Gambar 4.2:	<b>Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....</b>	<b>53</b>
Gambar 4.3:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 .....</b>	<b>55</b>
Gambar 4.4:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 .....</b>	<b>56</b>
Gambar 4.5:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 .....</b>	<b>57</b>
Gambar 4.6:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2017 .....</b>	<b>58</b>
Gambar 4.7:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 .....</b>	<b>59</b>
Gambar 4.8:	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017 .....</b>	<b>60</b>
Gambar 4.9:	<b>Persentase Penduduk Miskin dengan Peringkat 10 Tertinggi Menurut Kabupaten/Kota Pulau Jawa Tahun 2017 .....</b>	<b>61</b>

Gambar 4.10: Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....	65
Gambar 4.11: Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....	67
Gambar 4.12: Hasil <i>Chow Test</i> .....	69
Gambar 4.13: Hasil <i>Hausmant Test</i> .....	69
Gambar 4.14: Gini Rasio Menurut Provinsi Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....	77
Gambar 4.15: Perbandingan Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....	80
Gambar 4.16: Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa Tahun 2011-2017 .....	82





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: **Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Pulau Jawa Tahun 2011-2017**
- Lampiran 2: **Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Pulau Jawa Tahun 2017**
- Lampiran 3: **Hasil *Chow Test***
- Lampiran 4: **Hasil *Hausman Test***
- Lampiran 5: **Hasil Estimasi *Fixed Effect Model (Cross-section Weights)***
- Lampiran 6: **Distribusi dan Pertumbuhan Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Pulau Jawa Tahun 2015-2017**
- Lampiran 7: **Data Variabel Penelitian**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tidak satu pun negara diproklamasikan tanpa cita-cita abadi luhur, karena di setiap cita-cita itulah terletak kepentingan bersama yang diikat secara kuat untuk menggapai tujuan (Yustika, 2003). Begitu pun Indonesia, didirikan dengan menempatkan ideologi keadilan sosial sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan (ekonomi). Seluruh strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang dipilih haruslah menuju kepada kemaslahatan bersama, tidak diijinkan ada satu manusia yang lebih sejahtera secara mencolok dibandingkan dengan individu lainnya.

Sejak awal kemerdekaan, Bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian terhadap terciptanya masyarakat yang makmur sebagaimana termuat dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 4 menyatakan bahwa, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut, secara teknis upaya pengembangan ekonomi masyarakat yang didesain pemerintah juga diharapkan mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat ke tingkat kualitas kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Berakhirnya Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) pada tahun 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2030.

Tujuan MDGs yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi beberapa indikator dan target, yang salah satunya adalah tingkat kemiskinan nasional masih belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sejak diadopsi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015, Indonesia mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dan mengambil tindakan awal, termasuk menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta menindaklanjuti konvergensi antara SDGs, sembilan agenda prioritas “Nawa Cita” Presiden dan RPJMN. Salah satu tujuan yang dicanangkan pada urutan pertama dalam agenda SDGs, yang juga merupakan sebagai Prioritas Nasional yakni Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menghapus segala bentuk kemiskinan.

Isu mengenai kemiskinan (*poverty*) merupakan fokus pembangunan di setiap negara di Dunia, tak terkecuali negara maju sekalipun. Sekalipun telah menjadi komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan disadari bukan merupakan hal yang sederhana, mengingat sifatnya yang kompleks. Baik dilihat dari penyebabnya maupun dilihat dari ukurannya. Hal ini juga dikarenakan kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan manusia, yang sifatnya sangat beragam. Kompleksnya masalah kemiskinan membuatnya terus menjadi agenda rutin setiap tahapan pembangunan diberbagai negara. Setiap negara selalu berharap bisa terbebas dari masalah kemiskinan. Meski terdengar mustahil, namun harapan tersebut

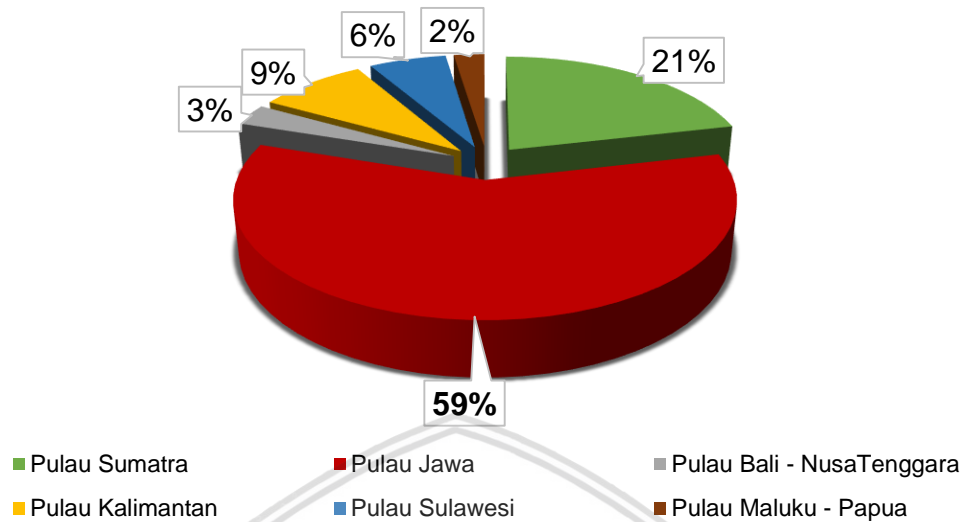
harus bisa diwujudkan oleh siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, bahwa seluruh masyarakat harus sejahtera.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi sarang kemiskinan. Kemiskinan adalah simbol sosial yang nyaris absolut dan tak terpecahkan. Predikat “Negara Miskin” seakan sulit lepas dari bangsa yang potensi kandungan kekayaan alamnya terkenal begitu melimpah. Karakteristik tertinggal dan keterbelakangan ekonomi adalah masih Indonesia. Sehingga menjadikan kemiskinan, sebagai musuh utama bagi Negara ini yang sedang membangun untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Di mana berbagai wilayah berada dalam lingkaran kemiskinan (*vicious circle*) terkungkung atau terbelilit dalam lingkaran kemiskinan atau lingkaran setan, seperti sangat susah untuk melepaskan atau keluar dari zona tersebut.

Pratama dalam Zuhdiyaty & Kaluge (2017) menyatakan, Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 27 tahun, masih mengalami masalah kemiskinan sebesar 24% jika angka kemiskinan di bawah 1\$ US dari 240 juta jiwa. Namun jika angka kemiskinan menggunakan standar hidup di bawah 2\$ US maka angka kemiskinan tersebut melonjak menjadi 35%. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini dirasa masih kurang efektif dalam menangani masalah kemiskinan yang ada.

Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yakni terdiri dari 17.504 pulau. Di mana lima diantaranya adalah pulau besar yakni Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua, ribuan sisanya adalah pulau-pulau kecil yang tersebar diseluruh wilayah yang membentang dari ujung paling barat (Sabang) sampai ke ujung timur (Merauke/Jayapura).

Gambar 1.1: Kontribusi Menurut Pulau Terhadap PDB Tahun 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial di tahun 2017 (Gambar 1.1), masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 59,09 persen. Diikuti Pulau Sumatra sebesar 21,52 persen, Pulau Kalimantan 8,50 persen, Pulau Sulawesi 6,09 persen, dan sisanya 5,64 persen pulau-pulau lainnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara spasial pada tahun 2017 menurut provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar terhadap PDB dengan total kontribusi 54,02 persen. Keempat provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sehingga itu artinya, Pulau Jawa menjadi pusat dari pada pertumbuhan ekonomi nasional, dibanding dengan wilayah lainnya. Namun, setelah pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan dengan cukup memuaskan, masalah yang timbul disekitar wilayah pembangunan ekonomi justru bertambah rumit. Kemiskinan merupakan bagian dari persoalan-persoalan tersebut.

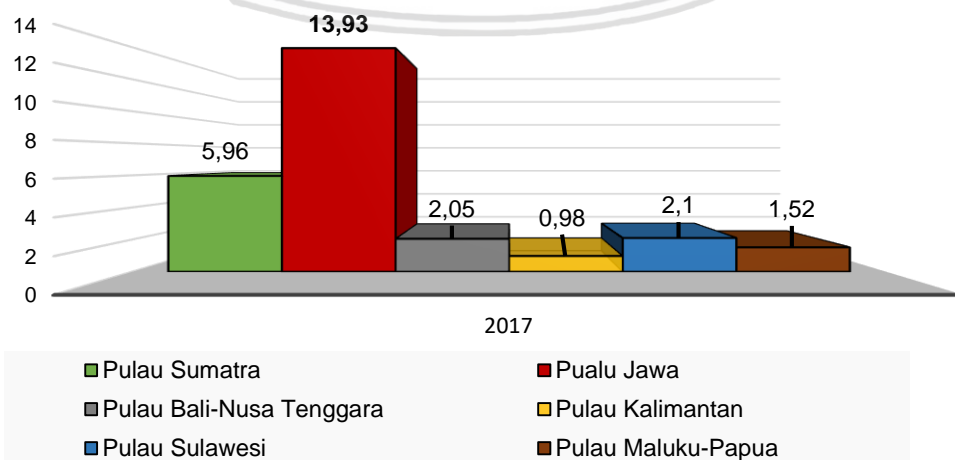
Menurut Adisasmita (2015) klasifikasi wilayah dapat ditetapkan menggunakan kriteria tingkat pendapatan per kapita (yang mencerminkan tingkat



kemakmuran), sehingga dapat dibedakan menjadi wilayah makmur (maju) dan wilayah kurang makmur (kurang maju). Klasifikasi wilayah dapat dilakukan pula menggunakan kemampuan berkembangnya wilayah (dilihat dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB per tahun), maka dapat dikelompokkan sebagai wilayah cepat bertumbuh (cepat berkembang) atau lamban bertumbuh (lamban berkembang).

Lebih lanjut Adisasmita (2015) menjelaskan, wilayah yang cepat bertumbuh/berkembang (*fast growing region*) atau wilayah yang maju (*developed region*) tidak menghadapi masalah yang berarti. Sebaliknya yang menghadapi berbagai kendala dan hambatan adalah wilayah yang lamban bertumbuh (*slow growing region*) atau wilayah yang kurang maju (*less developed*). Namun, fenomena sebaliknya justru terjadi di Pulau Jawa. Di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan dan dicapai dengan cukup memuaskan, masalah yang timbul di Pulau Jawa justru bertambah dan semakin sulit untuk diidentifikasi. Dapat diketahui pada Gambar 1.2 di bawah ini, jumlah penduduk miskin Indonesia secara spasial di tahun 2017, didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa.

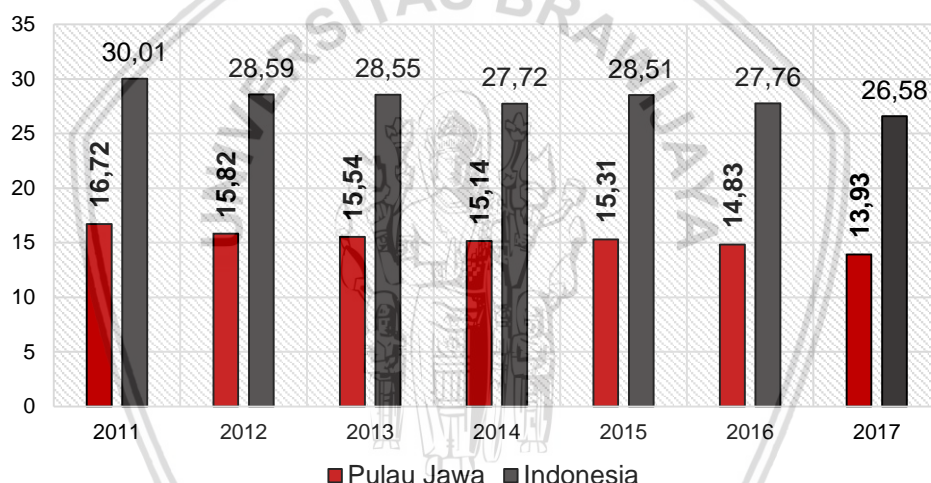
Gambar 1.2: **Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2017 (Juta Jiwa)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Berdasarkan gambar di atas, diketahui di tahun 2017 jumlah penduduk miskin tertinggi ditempati oleh Pulau Jawa, sebesar 13,93 juta jiwa. Kemudian di posisi kedua yakni Pulau Sumatra, diikuti Pulau Sulawesi, Pulau Bali-Nusa Tenggara, Pulau Maluku-Papua, dan di posisi terakhir ditempati oleh Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,98 juta jiwa. Lebih lanjut Gambar 1.3, jika dilihat perkembangan kemiskinan Pulau Jawa periode tahun 2011-2017, jumlah penduduk miskin Pulau Jawa terus mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015.

Gambar 1.3: **Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dan Pulau Jawa Tahun 2011-2017 (Juta Jiwa)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Berdasarkan gambar tersebut (Gambar 1.3) sekaligus dapat diketahui, bahwa lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia berada di Pulau Jawa. Sekitar 52 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa dari total penduduk miskin Indonesia 2017. Lebih lanjut lagi, jika dilihat dari tingkat persentase penduduk miskin menurut provinsi (Tabel 1.1), tingkat kemiskinan tertinggi ditempati oleh Provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 12,36 persen, kemudian Provinsi Jawa Tengah, diikuti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan terakhir Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 3,78 persen, di

tahun 2017. Sedangkan perkembangannya sendiri, rata-rata persentase kemiskinan pada masing-masing Provinsi periode tahun 2011-2017 mengalami penurunan kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Di mana kedua provinsi tersebut cenderung berfluktuatif.

**Tabel 1.1: Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	3.64	3.70	3.72	4.09	3.61	3.75	3.78
Jawa Barat	10.57	9.89	9.61	9.18	9.57	8.77	7.83
Jawa Tengah	16.21	14.98	14.44	13.58	13.32	13.19	12.23
D.I Yogyakarta	16.14	15.88	15.03	14.55	13.16	13.10	12.36
Jawa Timur	13.85	13.08	12.73	12.28	12.28	11.85	11.20
Banten	6.26	5.71	5.89	5.51	5.75	5.36	5.59

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Penurunan angka kemiskinan provinsi di Pulau Jawa disadari mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. BPS menilai, kemiskinan di Indonesia sudah pada tahap kronis, pemerintah sangat kesulitan hanya mengurangi 1% tingkat kemiskinan saja. Lebih dari itu, meski rata-rata angka kemiskinan menurun di setiap provinsi, angka tersebut masih belum mencapai target yang tercantum atau ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Tabel 1.2). Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui target/sasaran capaian tingkat kemiskinan pada masing-masing provinsi di Pulau Jawa.

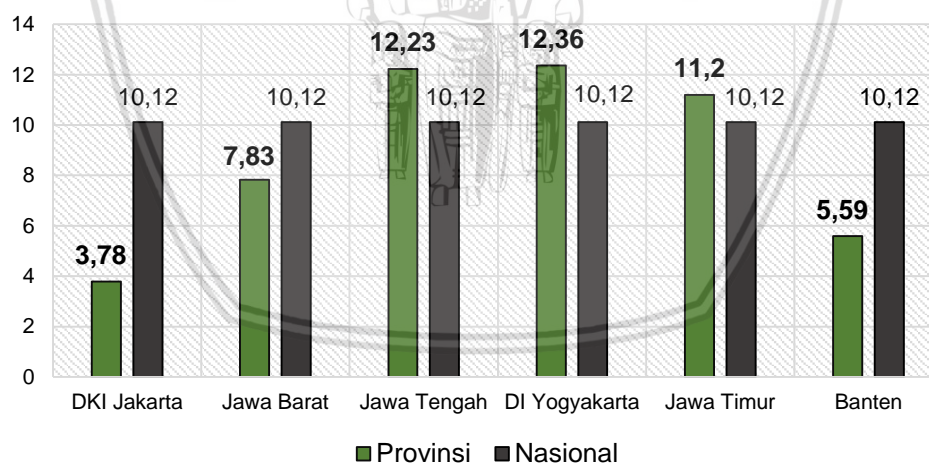
**Tabel 1.2: Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa Menurut Provinsi Tahun 2017 (Persen)**

DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	D.I Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
3.00	7.60	11.30	11.80	10.40	4.50

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2015 (diolah).

Fakta selanjutnya ditemukan, bahwa masih adanya provinsi yang memiliki persentase kemiskinan di atas persentase nasional pada tahun 2017 (Gambar 1.4). Hal tersebut menandakan bahwa masih adanya angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi di provinsi yang ada di Pulau Jawa, diantaranya Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Sesuai Rencana Pembangunan Wilayah Jawa 2018, lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan wilayah Jawa yakni, ketiga provinsi yang telah disebutkan sebelumnya, dan ditambah Provinsi Jawa Barat (Kementrian PPN/Bappenas, 2018). Selain itu, data Kabupaten/Kota yang ada juga menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017 (**Lampiran 1**), ternyata tidak jauh berbeda atau relatif sama. Ini memperlihatkan tidak banyaknya perubahan kondisi kesejahteraan di daerah Pulau Jawa.

Gambar 1.4: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Oleh karena beberapa hal tersebut, di mana masih perlunya upaya yang lebih kuat lagi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai nilai dari pembangunan manusia merupakan suatu hal penting dalam pengentasan

kemiskinan. Kemudian tingkat pengangguran, juga salah satu faktor penting untuk pengentasan kemiskinan. Di mana besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai membatasi kemampuan seseorang dan atau keluarga untuk menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan pokok (Sukirno, 2006).

Beberapa penelitian terkait masalah kemiskinan telah banyak dilakukan di Indonesia dengan menguji berbagai variabel yang mempengaruhi kemiskinan baik di tingkat Nasional maupun Daerah Kabupaten/Kota dan dengan periode waktu yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zuhdiyaty & Kaluge (2017), tentang pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mempengaruhi kemiskinan studi pada 33 Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan untuk Pertumbuhan Ekonomi, dan TPT tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian lain yang sejenis juga dilakukan oleh Alhudori (2017), yakni pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi tahun 2010-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Merujuk dua penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*), yakni pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu mempengaruhi kemiskinan, begitu juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran.

Berdasarkan pemaparan atas data, teori, fenomena ekonomi serta hasil penelitian terdahulu di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Apakah terjadi fenomena yang sama jika di Pulau Jawa, terkait kajian tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sebagai percontohan bagi daerah



lain di luar Pulau Jawa khususnya, yang akan menuju pembangunan ekonomi yang lebih sejahtera. Supaya nantinya ketika telah mencapai pembangunan yang diharapkan tidak mengulang permasalahan yang terjadi di Pulau Jawa. Mengingat banyaknya faktor penyebab kemiskinan yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan terbatasnya ketersediaan data yang memuat informasi tentang kemiskinan dan faktor-faktor penentunya maka penelitian ini akan dibatasi pada faktor-faktor yakni Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran. Dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Pulau Jawa dalam periode tahun 2011-2017.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, bahwa terdapat adanya kesenjangan (*gap*) antara teori yang ada dengan kondisi realita di Pulau Jawa periode tahun 2011-2017 terkait masalah kemiskinan. Sehingga, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2011-2017?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2011-2017.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

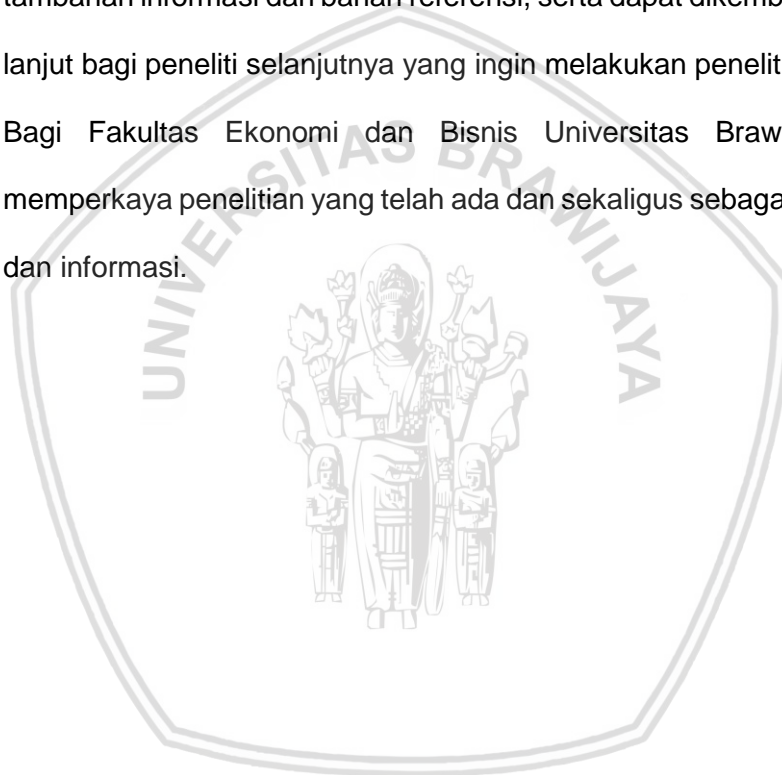
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Menjadi tambahan materi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah serta Instansi terkait dan Ekonom, sebagai bahan pertimbangan guna merumuskan kebijakan terkait masalah kemiskinan.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pembelajaran dalam memecahkan permasalahan dengan teori, menambah wawasan terkait hubungan variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan pengangguran dengan kemiskinan. Selanjutnya sebagai tambahan informasi dan bahan referensi, serta dapat dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.
- c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, untuk memperkaya penelitian yang telah ada dan sekaligus sebagai bahan studi dan informasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dikemukakan deskripsi dan kajian teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Sama halnya dengan kerangka teoretis (*theoretical framework*), menurut Usman dan Akbar (2011) pada hakikatnya meliputi deskripsi teoretis dan pembahasan penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pikir penelitian. Selanjutnya atas dasar kerangka teoretis tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang disebut sebagai perumusan hipotesis.

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Konsep Kemiskinan

Selama ini telah banyak dilakukan studi dan kajian tentang kemiskinan, akan tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu kemiskinan dan apa faktor penyebab kemiskinan, antara ahli yang satu dengan yang lain telah melukiskan masalah ini secara berbeda-beda. Levitan dalam Suyanto (2013) misalnya mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

UU No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan tentang istilah “fakir miskin”. Dalam undang-undang tersebut bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial.

Lebih dari itu, kemiskinan menurut *World Bank* didefinisikan sebagai “*poverty is prounounced deprivation in well being*” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan, sedangkan permasalahan inti pada

kemiskinan ini adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

BPS lebih lanjut menjelaskan, secara konseptual kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif merupakan suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "Termiskin". Dengan demikian ukuran kemiskinan relatif sangat bergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Sedangkan kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada definisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial

dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Sehingga penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Dimata sebagian ahli, kemiskinan seringkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, akan tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf hidupnya.

Studi yang dilakukan Wignjosoebroto *et al.*, dalam Suyanto (2013) menemukan bahwa seseorang atau keluarga yang dijejaskan kemiskinan, mereka umumnya tidaklah banyak berdaya, ruang geraknya serba terbatas, dan cenderung kesulitan untuk terserap dalam sektor-sektor yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan usahanya. Jangankan untuk mengembangkan diri menuju ke taraf sejahtera, untuk bertahan menegakkan hidup fisiknya pada taraf yang subsisten bagi keluarga miskin hampir-hampir merupakan hal yang mustahil bila tidak ditopang oleh jaringan dan pranata sosial di lingkungan sekitarnya.

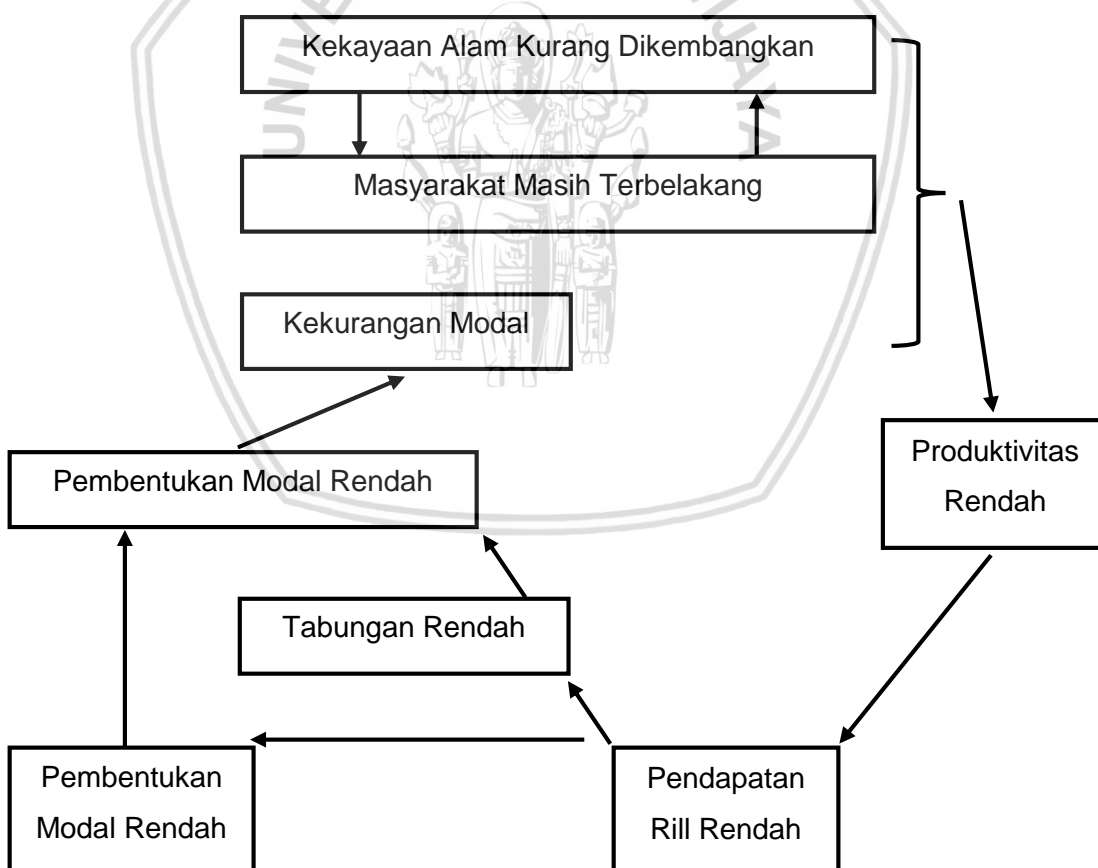
Definisi kemiskinan lain dikemukakan oleh John Friedman. Menurut Friedman dalam Suyanto (2013) kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi, 1) modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan dan kesehatan; 2) sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadahi; 3) organisasi sosial dan politik yang



dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi; 4) *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai; dan 5) informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Nurkse, Meier, dan Baldwin dalam Sukirno (2006) menggambarkan tiga bentuk perangkat kemiskinan. Jika disimpulkan lingkaran perangkat kemiskinan, pada hakikatnya bahwa, adanya ketidakmampuan mengerahkan tabungan yang cukup, kurangnya rangsangan melakukan penanaman modal, dan rendahnya taraf pendidikan, pengetahuan, serta kemahiran masyarakat. Ketiga lingkaran perangkat kemiskinan yakni pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1: **Lingkaran Perangkat Kemiskinan**



Sumber: Sukirno (2006).

Lebih dari itu Robert Chambers menyatakan, inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau “perangkap kemiskinan”. Secara rinci *deprivation trap* terdiri dari lima unsur, yaitu: 1) kemiskinan itu sendiri; 2) kelemahan fisik; 3) keterasingan atau kadar isolasi; 4) kerentanan; dan 5) ketidakberdayaan. Kelima unsur ini seringkali saling terkait satu dengan yang lain sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin. Kemiskinan sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya aset produksi untuk melangsungkan kehidupan. Kemiskinan selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan kelemahan jasmani.

### 2.1.2 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijakan yang komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Oleh karena itu, sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro dalam Suryana (2000) adalah: Pertama, meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional. Kedua, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan

ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Terdapat empat model pembangunan (Suryana, 2000) yaitu, model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan, dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, semua hal tersebut bertujuan pada perbaikan dari segala aspek kualitas hidup, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk seluruh rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

Teori pertumbuhan ekonomi sendiri dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Sedangkan menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2010), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Sukirno (2006), mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan nasional sendiri adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu, secara konseptual nilai tersebut

dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Sukirno (2006), cara menghitung PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

#### 1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan NTB (Nilai Tambah Bruto) barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (1 tahun). Sedangkan unit produksi diklasifikasikan menjadi sembilan lapangan usaha, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan, sektor konstruksi, sektor keuangan dan jasa perusahaan, sektor jasa serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

$$\text{PDRB} = \text{NTB sektor 1} + \text{NTB sektor 2} + \dots + \text{NTB sektor 9}$$

#### 2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa terhadap faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (1 tahun), terdiri atas pendapatan bunga (*Interest*), pendapatan sewa (*Rent*), gaji (*Wages*) dan laba (*Profit*).

$$\text{PDRB} = \text{Rent} + \text{Wages} + \text{Interest} + \text{Profit}$$

#### 3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan penjumlahan dari komponen permintaan akhir yang terdiri atas konsumsi rumah tangga (*Consumption*), investasi modal tetap domestik bruto (*Investment*), konsumsi pemerintah (*Government*) dan ekspor neto (*Export minus Import*).

$$\text{PDRB} = C + I + G + (\text{Ekspor} - \text{Impor})$$

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) diartikan sebagai tindakan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang menghasilkan tambahan output yang pada umumnya diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah. PDB atau PDRB merupakan indikator (tolok ukur) keberhasilan ekonomi dari suatu negara atau daerah. Menurut Adisasmita (2015) yang perlu diperhatikan dalam analisis PDB atau PDRB adalah 1) besarnya nilai PDB/PDRB, 2) PDB/PDRB perkapita, 3) tingkat pertumbuhan PDB/PDRB per tahun, 4) kontribusi masing-masing sektor terhadap total nilai PDB/PDRB pada tahun tertentu.

Teori pertumbuhan ekonomi senantiasa berkembang dan terus mengalami perbaikan, disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung. Menurut Sukirno (2006) terdapat tiga teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang telah dikembangkan sebelum para ahli ekonomi tertarik terhadap permasalahan pembangunan di negara berkembang. Ketiga teori tersebut antara lain teori pertumbuhan ekonomi Klasik, teori Schumpeter, dan teori Harrod-Domar.

Teori yang pertama yaitu teori pertumbuhan menurut ahli ekonomi Klasik diantaranya adalah Adam Smith, Robert Malthus, David Richardo, dan John Stuart Mill. Dari berbagai pendapat ahli tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang selanjutnya disebut sebagai teori pertumbuhan ekonomi klasik. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik (Sukirno, 2006):

1. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, dan tingkat teknologi.
2. Pendapatan masyarakat terbagi menjadi tiga yaitu upah para pekerja, keuntungan para pengusaha dan sewa tanah yang diterima oleh para tuan tanah.

3. Meningkatnya upah masyarakat akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk.
4. Besarnya pembentukan modal tergantung pada keuntungan yang diperoleh. Jika masyarakat tidak memperoleh keuntungan maka tidak akan terjadi pembentukan modal, sehingga perekonomian akan mencapai tingkat *stationary state*.
5. Terdapat asumsi hukum tambahan hasil yang berkurang atau *the law of diminishing return* yang berlaku bagi setiap kegiatan perekonomian.

Teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah teori Schumpeter yang menitik beratkan pada peran pengusaha sebagai pendorong pembangunan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan inovatif yang akan menggunakan modal dan faktor-faktor produksi, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat. Sependapat dengan kaum klasik, Schumpeter juga menyatakan bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mengalami keadaan *stagnation* atau tidak berkembang dikarenakan berkurangnya keinginan para pengusaha untuk menciptakan pembaharuan.

Teori Harrod-Domar yang merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai pertumbuhan ekonomi dan masalah penggunaan tenaga kerja. Menurut teori ini permintaan masyarakat dapat menentukan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan penanaman modal yang memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama adalah untuk menambah kapasitas barang modal dan meningkatkan pengeluaran agregat masyarakat (Sukirno, 2006). Selain itu rasio modal produksi menurut teori ini adalah tetap, artinya hanya terdapat satu kombinasi input (modal dan tenaga kerja) tertentu untuk menghasilkan sejumlah barang produksi.

Terakhir adalah teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dirintis oleh Robert Solow, kemudian diikuti oleh beberapa ahli ekonomi seperti Edmund Phelps,



Harry Johnson, dan J.E. Meade. Analisis di dalam teori ini didasarkan pada pandangan para Ekonom Klasik, sehingga disebut sebagai teori pertumbuhan Neo-Klasik. Berbeda dengan teori Harrod-Domar, permintaan masyarakat dalam teori ini tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi menurut teori ini ditentukan oleh penambahan penawaran faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada teori pertumbuhan Klasik yang memiliki asumsi *full employment* dan barang-barang modal akan sepenuhnya digunakan dari masa ke masa (Sukirno, 2006). Rasio modal produksi dalam teori ini adalah fleksibel, sehingga untuk menciptakan barang produksi tertentu, dapat menggunakan kombinasi antara modal dan tenaga kerja dengan jumlah yang berbeda, tidak harus proposional seperti dalam teori Harrod-Domar.

Dengan demikian, Sukirno (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan perekonomian yang mengakibatkan peningkatan barang dan jasa di masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sering diartikan sebagai peningkatan PDRB tanpa melihat apakah peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Kemudian, Ekonom Klasik dan Neoklasik menjelaskan setidaknya terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yakni teknologi yang digunakan, stok barang modal, jumlah penduduk serta luas tanah dan kekayaan alam.

Pertumbuhan ekonomi merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan dari berbagai macam sektor ekonomi dan merupakan indikator penting bagi suatu negara atau daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan pembangunan suatu daerah. adanya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan aktivitas perekonomian

sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan output dan selanjutnya akan memberikan balas jasa berupa pendapatan kepada masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut. Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila balas jasa berupa pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

### 2.1.3 Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah. Alternatif dari strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut *people-centered development* atau putting people *first*, Korten dalam Kuncoro (1997). Artinya manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (*empowerment*) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Sesuai dengan paradigma pembangunan yang menekankan pada pemberdayaan atau peningkatan sumber daya manusia (*human centered development*). Menurut Cobb-Douglas, modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor utama dalam proses pembangunan suatu bangsa. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset yang paling penting bagi pembangunan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam peningkatan pembangunan modal manusia (*Human Capital*).

Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan

sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

*Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM dikembangkan oleh Amartya Sen (Pemenang Nobel asal India) dan Mahbub ul Haq (Ekonom asal Pakistan), yang di bantu oleh Gustav Ranis (Yale University) dan Lord Meghnad Desai (London School of Economics). UNDP dalam Hendrani (2012), paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yakni:

1. Produktivitas: masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
2. Pemerataan: masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan ini.
3. Kestinambungan: akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi.

4. Pemberdayaan: pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Lebih lanjut, paradigma baru ini mengoreksi prinsip dan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada hal-hal berikut (Hendrani, 2012):

1. Teori pertumbuhan ekonomi menekankan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan akhir pembangunan. Pembangunan manusia menekankan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi sangat perlu bagi pembangunan manusia, namun pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan suatu faktor atau cara, bukan suatu tujuan pembangunan. Sejumlah fakta yang termuat dalam laporan UNDP menunjukkan tidak adanya hubungan yang otomatis antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemajuan dalam pembangunan manusia.
2. Teori-teori modal manusia (*human capital formation*) dan pembangunan sumber daya manusia (*human resources development*) memandang manusia sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan ketimbang menekan aspek pemberdayaan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Teori-teori ini memandang manusia sebagai input atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan produksi. Dengan demikian, manusia yang tidak atau kurang mampu memproduksi dipandang sebagai beban. Dalam prinsip pembangunan manusia, tidak dikenal segmen penduduk yang dianggap sebagai beban dalam pembangunan. Pembangunan harus dapat menawarkan pilihanpilihan bagi berbagai segmen penduduk menurut potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kemerdekaan dan martabat manusia.
3. Pendekatan kebutuhan kesejahteraan manusia (*the human welfare need approach*) melihat manusia semata-mata sebagai penerima dalam proses

pembangunan, sedangkan konsep pembangunan manusia menekankan perlunya memperluas pilihan agar manusia selain dapat menikmati hasil-hasil pembangunan juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek pembangunan itu sendiri.

4. Pendekatan kebutuhan dasar (*the basic need approach*) memusatkan perhatian pada barang dan jasa yang justru bisa memperluas kesenjangan kebutuhan antar kelompok penduduk. Pendekatan ini lebih memperhatikan aspek penyediaan barang dan jasa ketimbang implikasinya terhadap perluasan pilihan bagi berbagai kelompok penduduk itu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yang digunakan sebagai indikator yaitu (i) bidang kesehatan: usia hidup (*longevity*); (ii) bidang pendidikan: pengetahuan (*knowledge*); dan (iii) bidang ekonomi: standar hidup layak (*decent living*). IPM merupakan Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan hasil pembangunan lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur menggunakan 3 dimensi, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam perjalanannya, IPM mengalami perubahan indikator (Tabel 2.1), yakni di tahun 2010.

Tabel 2.1: **Metode Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Metode Lama (Sebelum 2010)		Metode Baru (Pasca 2010)	
Dimensi	Indikator	Dimensi	Indikator
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup (AHH)
Pendidikan dan Pengetahuan	Angka Melek Huruf dan Rasio Kombinasi Partisipasi Kotor Primer, Sekunder, dan Tersier	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Sekolah
Standar Hidup Layak	Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita	Standar Hidup Layak	Produk Nasional Bruto (PNB) Per Kapita

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah).

#### 2.1.4 Konsep Pengangguran

Kehilangan pekerjaan dapat menjadi peristiwa ekonomi paling sulit dalam hidup seseorang. Kebanyakan orang mengandalkan mata pencaharian mereka untuk mempertahankan standar hidup. Seseorang disebut bekerja jika selama seminggu melakukan aktivitas ekonomi dan dilakukan minimal selama 1 jam. Sedangkan, seseorang disebut pengangguran apabila mereka tidak bekerja akan tetapi aktif dalam mencari pekerjaan. Wanita yang memilih menjadi ibu rumah tangga, anak-anak yang bersekolah termasuk mahasiswa tidak tergolong sebagai pengangguran namun masuk dalam golongan bukan angkatan kerja. Lebih lanjut pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena



sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment, and Underemployment* (ILO, 1992), merupakan sumber dari konsep dan definisi untuk menentukan data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan definisi standar dari pengangguran adalah apabila ketiga kriteria, yaitu tidak memiliki pekerjaan, dapat melakukan pekerjaan, dan yang terakhir mencari pekerjaan, terpenuhi.

Dalam Case dan Fair (2008) dijelaskan bahwa pengangguran terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pengangguran friksional, struktural, dan siklis. Pengangguran friksional dalam Mankiw (2008) dijelaskan sebagai pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Di mana setiap tenaga kerja yang ada memiliki preferensi dan juga kemampuan yang berbeda, akan tetapi informasi yang tersedia tidaklah sempurna, sehingga dibutuhkan waktu untuk memperoleh suatu pekerjaan. Pengangguran friksional sendiri tidak bisa dihindari melihat keadaan perekonomian yang selalu berubah.

Pengangguran struktural dalam Mankiw (2008) dijelaskan sebagai pengangguran yang terjadi akibat kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan, pengangguran tersebut terjadi bukan dikarenakan ketidakcocokan pada keahlian atau preferensi yang ada, akan tetapi dikarenakan ketidaksesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan suatu pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Terakhir pengangguran siklis, dalam Case dan Fair (2008) dijelaskan sebagai pengangguran yang terjadi selama resesi dan depresi. Di mana pada saat resesi, perusahaan akan menghasilkan output yang sedikit, perusahaan tersebut melakukan pemotongan karyawan sehingga modal akan menjadi lebih sedikit.

Selain tiga jenis pengangguran di atas, dalam Case dan Fair (2008) juga dijelaskan tentang tingkat pengangguran alamiah. Tingkat pengangguran alamiah,

merupakan pengangguran yang terjadi karena fungsi normal perekonomian. Tingkat pengangguran alamiah juga dianggap sebagai total dari pengangguran friksional dan struktural.

Tingkat Pengangguran Terbuka sering digunakan oleh pemerintah dalam menilai apakah kinerja di bidang ketenagakerjaan berjalan baik atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai sumber data atas tingkat pengangguran. TPT memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, di mana rumus dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), adalah:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

## 2.2 Hubungan antara Variabel Dependen dan Variabel Independen

### 2.2.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Indikator baik atau buruknya perekonomian suatu negara dan tolak ukur kesejahteraan masyarakat dicerminkan dari pertumbuhan ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya indikator yang mampu menjelaskan kinerja perekonomian, namun indikator pertumbuhan ekonomi dapat memberikan suatu gambaran aktivitas perekonomian suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengidentifikasi sumber-sumber yang menjadi pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan (*aggregat demand*) maupun dari sisi penawaran (*aggregate supply*) yang menggambarkan aktivitas perekonomian.

Merujuk pada Hipotesis Kuznets dalam Tambunan (2015), yang menyatakan bahwa pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir dari

pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Sudah cukup banyak studi empiris yang menguji realisasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan hasilnya menunjukkan bahwa memang ada suatu korelasi yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Misalnya Hasan dan Quibria, dalam Tambunan (2015) yang menguji secara empiris dampak dari pola pertumbuhan output menurut sektor terhadap penurunan kemiskinan dengan menggunakan data panel dari 45 negara di Asia Timur dan Selatan, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika Sub-Sahara.

Hasilnya bahwa ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, negara-negara dengan tingkat Pendapatan Nasional per kapita yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tingkat Pendapatan Nasional per kapitanya lebih rendah. Hasil estimasi ini didukung oleh banyak studi lainnya seperti dari World Bank dalam Tambunan (2015), yang juga menunjukkan adanya suatu hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Hasil dari beberapa studi di atas mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran pada Gambar 2.2, yakni efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa adanya mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi *trickle-down* dari keuntungan dalam pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

Gambar 2.2: **Kerangka Pemikiran Teoretis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan**



Sumber: Tambunan, 2015 (diolah).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan keharusan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Apabila perekonomian suatu wilayah berkembang pesat maka kegiatan ekonomi yang dilakukan wilayah tersebut juga meningkat sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat dan terdistribusi merata, dalam hal ini kemiskinan akan dapat dikurangi.

### 2.2.2 Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan

Jika menurut dimensi dari IPM dapat dijelaskan bahwa, dari dimensi pendidikan, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Dengan pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki modal manusia yang rendah, baik dari pengetahuan, kesehatan, dan ekonomi pasti lebih mudah menjadi miskin dari pada orang yang memiliki modal manusia.

Ginting, *et. al* (2008), menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin, karena aset utama

penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau, sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Pratama dalam Zuhdiyaty & Kaluge (2017) modal Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia menjadi variabel penting bagi suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan.

Selain itu, Arsyad (2010) menyatakan, salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun.

### **2.2.3 Hubungan antara Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan kondisi di mana pendapatan individu atau sekelompok orang tidak dapat mencukupi kebutuhan minimum mereka untuk dapat hidup layak. Arsyad (2010) berpendapat bahwa terdapat hubungan antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap selalu berada di antara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Sebagian besar anggota “kelompok paling miskin” adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan teratur atau yang hanya bekerja secara musiman. Mereka yang memiliki pekerjaan permanen di sektor

pemerintah ataupun di sektor swasta pada umumnya termasuk ke dalam kelompok berpendapatan menengah dan tinggi. Akan tetapi tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa setiap orang yang tidak bekerja itu pasti miskin atau mereka yang punya pekerjaan permanen selalu memiliki penghasilan yang tinggi. Selalu saja kita temukan pengangguran sukarela di setiap masyarakat, yakni mereka yang sebenarnya bisa, atau bahkan mudah mendapatkan sebuah pekerjaan tetap, namun memilih menganggur untuk alasan tertentu. Dengan pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa orang yang menganggur pasti lebih mudah menjadi miskin dari pada orang yang tidak menganggur. Meskipun antara pengangguran dan kemiskinan tidak bisa diidentikkan, namun dapat disimpulkan bahwa salah satu cara atau mekanisme yang utama dalam mengurangi kemiskinan di Negara Berkembang adalah penciptaan lapangan kerja berupah yang memadai bagi kelompok penduduk miskin.

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2006).

Besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai membatasi kemampuan keluarga untuk menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan pokok (Sukirno 2006). Salah satu faktor terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakatnya, di mana pendapatan akan diperoleh seseorang ketika bekerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai alat ukur



kemakmuran suatu negara, yang memiliki korelasi positif. Artinya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu negara.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan suatu penelitian, sekaligus sebagai acuan, sehingga peneliti dapat memperkaya pembahasan yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Beberapa jurnal yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, diantaranya tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2: **Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Yarlina Yacoub (2012)	Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	Regresi data panel	Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005- 2010
2.	Alberto Javier Iniguez- Montiel (2014)	<i>Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth (1992- 2008)</i>	Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pertumbuhan Ekonomi	<i>Growth Incidence Curves (GICs)</i>	Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang rendah berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Mexico, dalam

					jangka pendek, menengah dan panjang begitu sebaliknya.
3.	Noor Zuhdiyaty dan David Kaluge (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi)	Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Regresi data panel	IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan, sementara Pertumbuhan Ekonomi dan TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2011-2015
4.	M. Alhudori (2017)	Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi Tahun 2010-2015	Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Pengangguran	Regresi linear berganda metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin
5.	Ridzky Giovanni (2018)	Analisis Pengaruh PDRB,	Kemiskinan, Pendidikan, Tingkat	Regresi Data Panel	TPT dan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh

		Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009- 2016	Pengangguran Terbuka (TPT), dan PDRB		signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sementara PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009- 2016
--	--	--	---	--	---

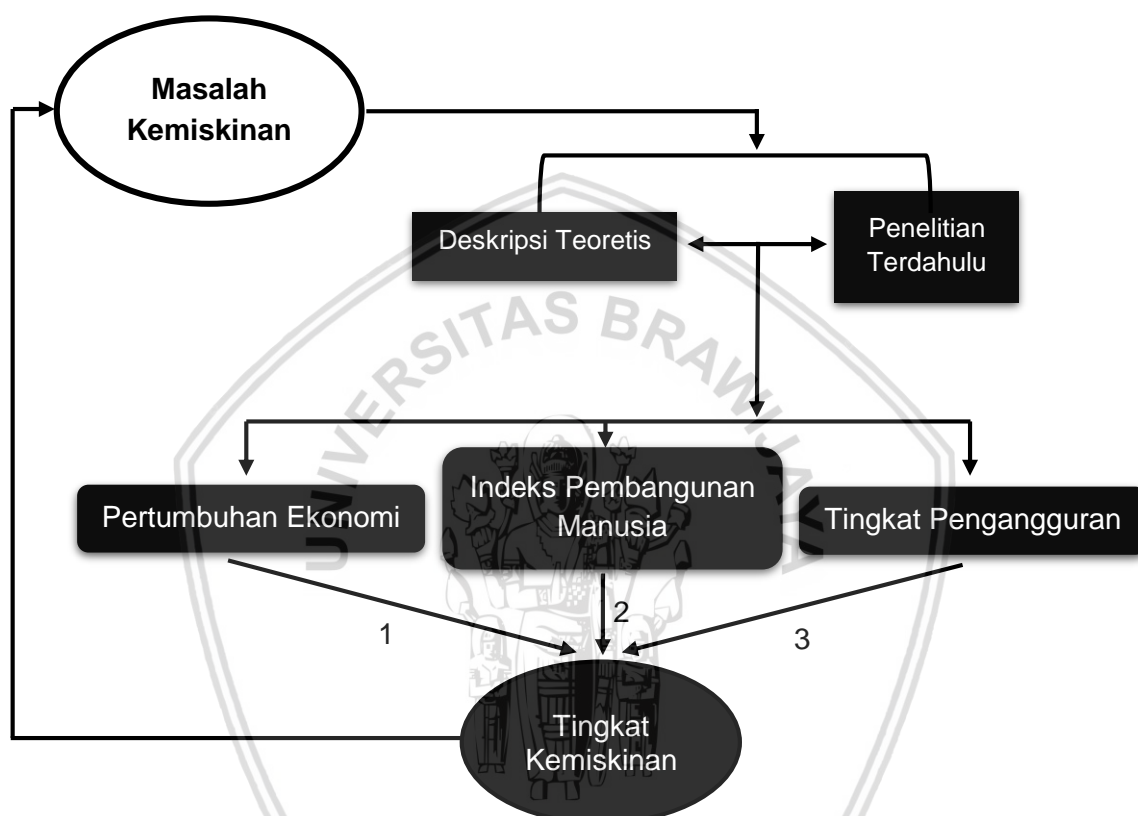
Sumber: Berbagai sumber (diolah).



## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, kerangka teoretis, serta mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu, maka kerangka pikir dalam penelitian ini, disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3: **Kerangka Pikir Penelitian**



Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2018.

Alur pertama, berdasarkan Hipotesis Kuznets dalam Tambunan (2015) dan kerangka pemikiran, yakni efek *trickle-down* dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Sudah cukup banyak studi empiris yang menguji realisasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan hasilnya

menunjukkan bahwa memang ada suatu korelasi yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Misalnya Hasan dan Quibria, dalam Tambunan (2015) yang menguji secara empiris dampak dari pola pertumbuhan output menurut sektor terhadap penurunan kemiskinan. Hasilnya ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka semakin rendah tingkat kemiskinan.

Alur kedua, Pratama dalam Zuhdiyaty dan Kaluge (2017) modal Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik, dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia menjadi variabel penting bagi suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan, yang berkorelasi negatif. Apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun, begitupun sebaliknya.

Alur ketiga, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai membatasi kemampuan seseorang dan atau keluarga untuk menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan pokok (Sukirno 2006). Salah satu faktor terpenting adalah pendapatan yang diperoleh, di mana pendapatan akan diperoleh seseorang ketika bekerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran

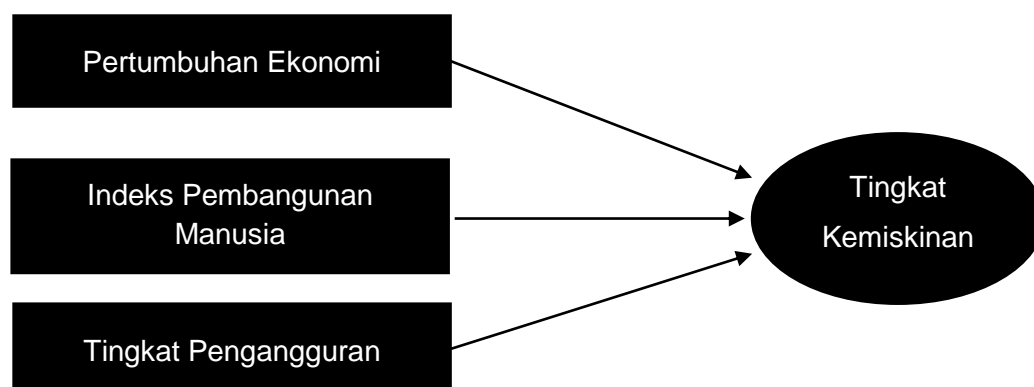
dapat digunakan sebagai alat ukur kemakmuran suatu negara, yang memiliki korelasi positif. Artinya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu negara, begitupun sebaliknya.

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang disebut sebagai perumusan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang dikemukakan. Perumusan hipotesis bertujuan untuk memfokuskan masalah, mengidentifikasi data yang relevan untuk dikumpulkan, menunjukkan bentuk desain penelitian termasuk teknis analisis yang akan digunakan, menjelaskan gejala sosial, mendapatkan kerangka penyimpulan, serta merangsang penelitian lebih lanjut. Sehingga dapat dikatakan fungsi dari hipotesis penelitian adalah sebagai acuan untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pembangunan hipotesis penelitian (*hypothesis development*) merupakan pernyataan yang sesuai mengenai teori dan konsep yang dapat dinilai kebenaran atau kesalahannya dengan mengacu pada suatu fenomena yang diamati dan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan demikian hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar 2.4: **Gambaran Hipotesis Penelitian**



Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2018.



1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
3. Diduga Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

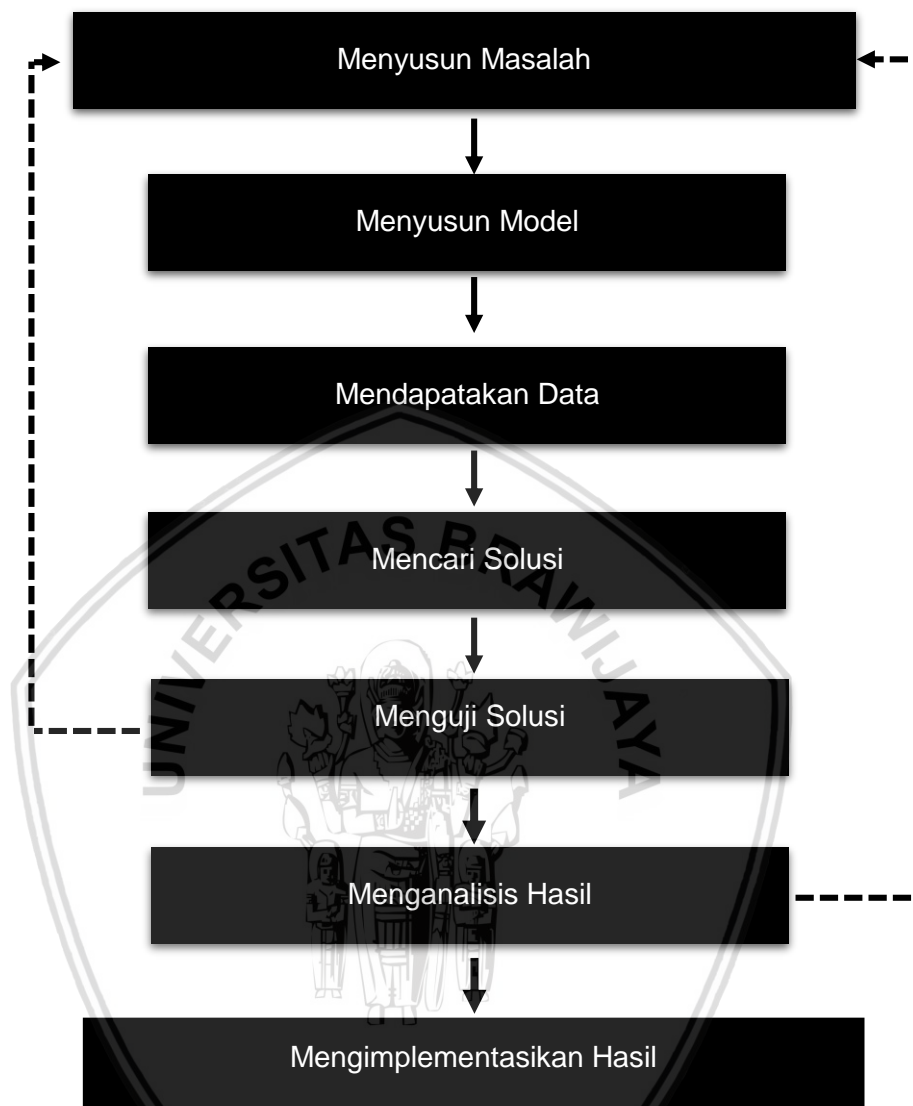
Pada bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, dijelaskan oleh Usman dan Akbar (2011), bahwa metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Di mana prosedur atau cara dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *applied research* atau penelitian terapan atau penelitian kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013) yang dimaksud dengan pendekatan *applied research* adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berasal dari data yang selanjutnya diproses dan dimanipulasi sehingga dapat menjadi informasi yang berharga bagi pengambil keputusan. Selain itu, Creswell (2016) menjelaskan “penelitian kuantitatif menguji suatu teori dengan cara memperinci hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut”

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka), yang dapat dibedakan menjadi, data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak diantara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah untuk menggunakan dan mengembangkan model-model matematis, teori-teori, dan atau suatu hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi. Seperti pada gambar 3.1 alur atau tahapan dari pendekatan kuantitatif dijelaskan di bawah ini.

Gambar 3.1: Tahapan Pendekatan *Applied Research* atau Pendekatan Kuantitatif



Sumber: Kuncoro, 2013 (diolah).

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa. Periode pengamatan pada penelitian ini dilakukan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Pemilihan periode penelitian (pengamatan) didasarkan pada anggapan yang berkenaan dengan kemampuan periode yang bersangkutan untuk memberi informasi secara tepat dan dengan mempertimbangkan pula faktor ketersediaan data.

### 3.2 Metode Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai alat pendukung pembuktian jawaban penelitian. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2011) ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh dari publikasi lembaga-lembaga terkait kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

Objek penelitian ini ialah Pulau Jawa, dengan mempergunakan data Kabupaten/Kota untuk mendapatkan hasil estimasi. Penelitian ini tidak memasukkan seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa. Kabupaten/Kota yang dikeluarkan dari objek penelitian yakni Kabupaten Pangandaran, dengan alasan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Ciamis, yang baru ditetapkan pada tahun 2012. Sehingga adanya keterbatasan data yang dibutuhkan guna penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau merupakan hasil olahan data yang berasal dari dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dikumpulkan oleh pihak atau suatu badan tertentu. Menurut Kuncoro (2013) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi dan basis data pada situs resmi dari berbagai institusi, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) baik di tingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (Simreg) Bappenas baik di tingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

### 3.3 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek yang berbeda (Kuncoro, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yakni:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel ini disebut juga sebagai variabel stimulus, variabel prediktor, variabel *antecedent*, dan ubahan bebas atau variabel yang memengaruhi. Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (Usman & Akbar, 2011).

2. Variabel Dependen (*Dependent Variable*)

Variabel ini disebut juga sebagai variabel output, variabel kriteria, variabel konsekuen, variabel terikat atau ubahan tidak bebas. Variabel dependen ialah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengaruh independen (Usman & Akbar, 2011).

### 3.4 Definisi Operasioanal dan Pengukuran Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat atau sesuatu hal yang dapat diamati atas variabel-variabel penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan batasan terhadap variabel penelitian yang digunakan, Definisi operasional atas variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin, yakni persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laju nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Kabupaten/Kota Pulau Jawa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini digambarkan dengan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dinyatakan dalam persentase.

## 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam penelitian ini, dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran, yang merupakan perhitungan IPM Metode Baru.

## 4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yakni persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

### 3.5 Metode Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian yakni penelitian kuantitatif dan dengan mempertimbangkan data yang diperoleh, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Menurut Gujarati dan Porter (2009) data panel adalah data kombinasi antara data runtut waktu (*time-series*) dan data kerat lintang (*cross-section*). Kemudian menurut Kuncoro (2013) data panel atau data *pooling*, adalah kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat.

Jenis data untuk penelitian ekonometrika sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu data *time-series*, data *cross-section*, dan data panel. Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu pada sebuah periode waktu tertentu. Maka dari itu akan didapatkan berbagai observasi pada



setiap individu di dalam sampel. Dengan kata lain yang telah dijelaskan sebelumnya, data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu (*time-series*) dan data lintas individu (*cross-section*).

Data panel dapat menjadi sangat bermanfaat karena data jenis ini membantu peneliti untuk mendalami efek ekonomi yang tidak dapat diperoleh dengan hanya menggunakan data lintas waktu ataupun hanya data lintas individu. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross-section* maupun *time-series*, data panel secara substansial mampu mendalami masalah *omitted variables*. Secara umum, penggunaan data panel mampu memberikan banyak keunggulan secara statistik maupun secara teori ekonomi, antara lain:

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu digunakan dalam persamaan ekonometrika.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas setiap individu, pada gilirannya membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya, maka penggunaan panel data akan mengurangi masalah *omitted variables* secara substansial.
4. Karena mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang, maka data panel sangat baik digunakan untuk *study of dynamic adjustments*.
5. Dengan meningkatnya jumlah observasi, maka akan berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang, dan peningkatan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.

Permasalahan-permasalahan terkait data panel dapat diatasi dengan beberapa model estimasi yang dapat memberikan hasil yang lebih efisien (Gujarati & Porter, 2009). Menurut Ekananda (2016) terdapat tiga macam model estimasi yang dapat dilakukan, yaitu *Pooled Least Square* (PLS) atau *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga macam model estimasi dalam regresi data panel:

1. *Pooled Least Square* (PLS) atau *Common Effect Model* (CEM), model ini merupakan model yang paling sederhana dalam model estimasi regresi data panel. Kesederhanaan model ini dapat dilihat dari tidak terlalu diperhatikannya sifat *cross-section* dan *time-series* (Gujarati dan Porter, 2009). Hasil estimasi dalam model ini adalah nilai  $R^2$  yang tinggi, tetapi koefisien regresi tidak terlalu signifikan secara statistik. Masalah terbesar dalam model ini adalah heterogenitas yang tertutupi sehingga menimbulkan permasalahan autokorelasi.
2. *Fixed Effect Model* (FEM), menurut Ekananda (2016) FEM adalah metode yang mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik variabel pada data *cross-section*. Istilah *fixed effect* diambil karena meskipun intersep berbeda untuk tiap subjek tetapi individu tidak berubah ketika terjadi pergantian waktu (Gujarati dan Porter, 2009). Terdapat dua macam model *fixed effect*, yaitu *fixed effect* satu arah (intersep berbeda) dan *fixed effect* dua arah (menambahkan variabel dummy dan memasukkan efek individual dan waktu).
3. *Random Effect Model* (REM), keputusan untuk memasukkan variabel dummy dalam FEM dapat mengurangi besarnya derajat kebebasan, sehingga efisiensi dari parameter yang diestimasi akan berkurang (Gujarati dan Porter, 2009). Model data panel memiliki korelasi antar *error term* sebagai akibat dari berubahnya waktu dan berbedanya observasi, hal itu dapat diatasi dengan

model REM. Dalam persamaan model REM selalu mempertimbangkan karakteristik individu. *Slope* memiliki nilai yang tetap tetapi intersep bervariasi untuk setiap individu (Ekananda, 2016).

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan software Eviews *Student Version 10*.

### 3.5.1 Penentuan Model

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel. Regresi data panel dipilih karena data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel, yaitu perpaduan data dari *time-series* (data tahunan dengan satu objek penelitian) dan *cross-section* (banyak objek penelitian dalam kurun waktu satu tahun). Berdasarkan metode analisis regresi data panel, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$TK_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

TK = Tingkat Kemiskinan

PE = Pertumbuhan Ekonomi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

$\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

e = *Error*

i = *Cross Section*

t = *Time Series*

### 3.5.2 Metode Pemilihan Model

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat tiga model estimasi dalam regresi data panel, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), oleh karena itu perlu dilakukan pengujian untuk

mengetahui model manakah yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Terdapat tiga macam pengujian pemilihan model, diantaranya:

1. Uji Chow (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau menentukan model mana yang terbaik antara CEM dan FEM, dengan melihat nilai dari Probabilitas (Prob.) *Cross-section F*. Jika nilai Prob. *Cross-section F* > alpha 5% ( $\alpha = 0.05$ ) maka model yang terpilih adalah CEM, tetapi jika nilai Prob. *Cross-section F* < alpha 5% ( $\alpha = 0.05$ ) maka model yang terpilih adalah FEM.

2. Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau menentukan model mana yang terbaik antara FEM dan REM, dengan melihat nilai dari Probabilitas (Prob.) *Cross-section random*. Jika nilai Prob. *Cross-section random* > alpha 5% ( $\alpha = 0.05$ ) maka model yang terpilih adalah REM, tetapi jika nilai Prob. *Cross-section random* < alpha 5% ( $\alpha = 0.05$ ) maka model yang terpilih adalah FEM.

3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau menentukan model mana yang terbaik antara REM dan CEM, dengan melihat Probabilitas (Prob.) *Breusch-Pagan* (BP). Jika nilai Prob. BP > alpha 5% ( $\alpha = 0.05$ ) maka model yang terpilih adalah CEM, tetapi jika nilai Prob. BP < alpha 5% ( $\alpha = 0.05$ ) maka model yang terpilih adalah REM.

### 3.5.3 Uji Statistik

Uji statistik terdiri dari uji t, uji F, dan uji  $R^2$ . Uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh dari suatu variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui hipotesis, digunakan kriteria bila t hitung > t tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Kriteria tersebut mempunyai arti ada pengaruh positif variabel bebas terhadap variabel terikat dengan derajat

kayakinan yang digunakan sebesar  $\alpha = 1\%$   $\alpha = 5\%$ ,  $\alpha = 10\%$ , begitu pula sebaliknya bila  $t$  hitung  $< t$  tabel maka menerima  $H_0$  dan menolak  $H_1$  artinya ada pengaruh negatif variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Rumusan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

1.  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  ( $\alpha = 0,05$ ):  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti bahwa variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2.  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$  ( $\alpha = 0,05$ ):  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang berarti bahwa variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji  $R^2$  digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh dari variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel independen lain diluar model. Semakin besar nilai koefisien determinasinya, maka semakin baik pula model yang diperoleh, di mana koefisien determinasinya mendekati satu. Untuk penelitian yang menggunakan variabel bebas lebih dari dua, maka yang digunakan nilai adjusted  $R^2$ .

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Objek Penelitian

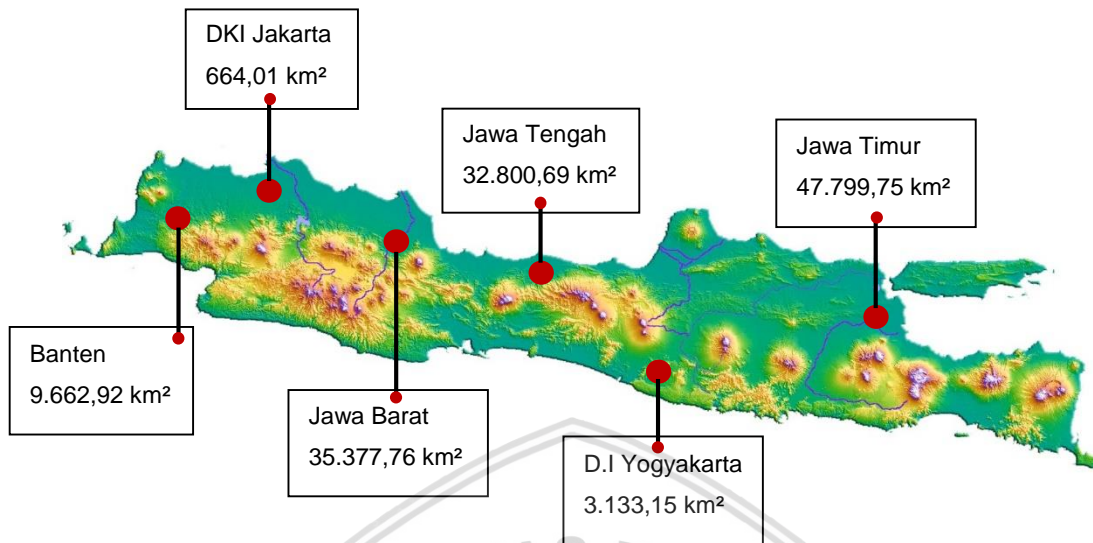
##### 4.1.1 Gambaran Umum Pulau Jawa

Indonesia adalah sebuah negara yang membentang di Khatulistiwa dengan bentuk kepulauan. Letak Indonesia secara geografis berada pada posisi silang, di antara 2 Benua dan 2 Samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah Benua Asia dan Benua Australia. Sedangkan samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak Indonesia secara astronomis berada pada, 6° Lintang Utara sampai dengan 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur samapi dengan 141° Bujur Timur. Karena merupakan Negara dengan bentuk kepulauan, menjadikan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di Dunia, dengan total pulau yang dimilikinya berjumlah 17.504 pulau, dengan luas wilayah 1.913.578,68 km<sup>2</sup>. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai dengan tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia mencapai 258,7 juta jiwa, sejak tahun 2010 populasi Indonesia telah meningkat sebesar 21,06 juta jiwa. Perlu diketahui bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.

Pulau Jawa merupakan salah satu bagian dari pulau besar di Indonesia, yang terletak di bagian Selatan Nusantara. Pulau Jawa dikelilingi oleh perairan Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia, dan Selat Bali. Secara administratif (Gambar 4.1) Pulau Jawa terbagi atas 6 Provinsi, yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4.1: Luas Wilayah Administratif Pulau Jawa



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Pulau Jawa telah menjadi pulau paling berkembang di Indonesia sejak era Hindia Belanda hingga saat ini, baik dari segi ekonomi maupun sosial dan kependudukan. Perkembangannya sangat dirasakan terutama di Era Otonomi Daerah, yang dimulai pada tahun 2001. Otonomi Daerah sebagai amanat UU nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi UU 32 tahun 2004, merupakan momentum emas bagi setiap daerah. Otonomi Daerah sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai pada tahun 2017 total Kabupaten/Kota di Pulau Jawa berjumlah 119 Kabupaten/Kota. Berikut Tabel 4.1, Data wilayah administratif dan jumlah penduduk Pulau Jawa di tahun 2017:

Tabel 4.1: Wilayah Administratif dan Jumlah Penduduk Pulau Jawa Tahun 2017

Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk
DKI Jakarta	1	5	44	267	10,22 Juta Jiwa
Jawa Barat	18	9	627	5.962	48,03 Juta Jiwa

Provinsi	Kabupaten	Kota	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk
Jawa Tengah	29	6	573	8.559	34,26 Juta Jiwa
D.I Yogyakarta	4	1	78	438	3,72 Juta Jiwa
Jawa Timur	29	9	665	8.501	39,29 Juta Jiwa
Banten	4	4	155	1.551	12,45 Juta Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Saat ini berdasarkan Tabel di atas, jumlah Kabupaten/Kota yang dimiliki Pulau Jawa yakni berjumlah 119 Kabupaten/Kota, dengan total 2.142 Kecamatan dan 25.278 Desa, yang dihuni penduduk sebanyak 147,97 juta orang. Selain itu jika menurut provinsi, diketahui secara administratif Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 10,22 juta jiwa. Kemudian Provinsi Jawa Barat, 27 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak dibanding dengan provinsi lainya yakni 48,03 juta jiwa, Provinsi Jawa Tengah 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 34,26 juta jiwa, Provinsi D.I Yogyakarta 5 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terkecil diantara provinsi lainnya yakni 3,72 juta jiwa, Provinsi Jawa Timur 38 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat yakni 39,29 juta jiwa, dan terakhir Provinsi Banten 8 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 12,45 juta jiwa.

Menjadi sangat penting di sini, perekonomian Pulau Jawa mempunyai kontribusi yang penting bagi perekonomian nasional. Kegiatan ekonomi Indonesia terkonsentrasi di wilayah ini. Namun hal tersebut, tak menjadikan Pulau Jawa terbebas dari persoalan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan bagian dari permasalahan tersebut, yang masih saja sulit untuk diatasi. Sehingga perkembangannya menjadi peting untuk diketahui.

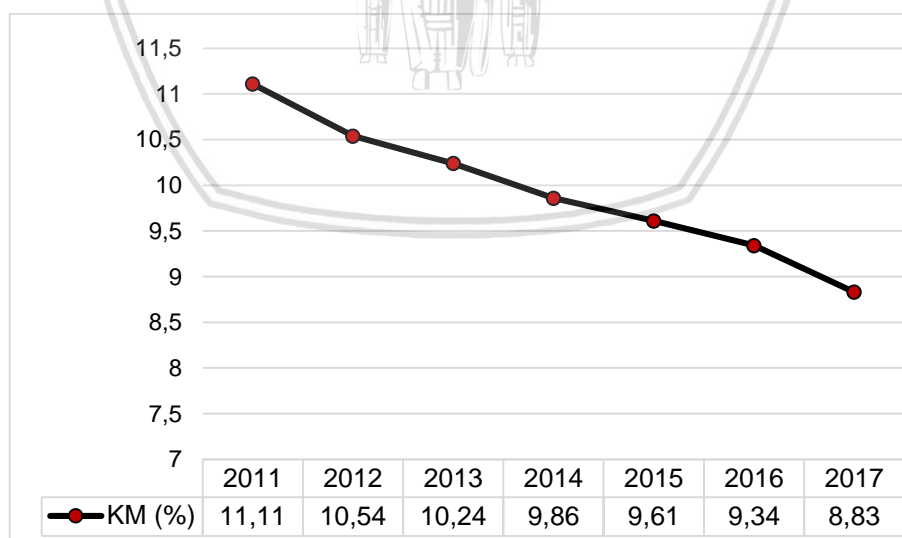
#### 4.1.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban, sehingga semua pihak sepakat bahwa kemiskinan

harus ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran. Oleh karena itu, penting dilakukannya pemantauan perkembangan tingkat kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan (tingkat kemiskinan yang dimaksud merupakan persentase dari penduduk miskin) di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017 ditunjukkan pada Gambar 4.2. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa terlihat adanya tren penurunan dari tahun ke tahun. Rata-rata angka kemiskinan Pulau Jawa pada periode tersebut sebesar 9,93 persen, artinya sebesar 9,93 persen dari penduduk Pulau Jawa adalah penduduk miskin. Setidaknya, angka tersebut masih di bawah rata-rata angka kemiskinan Nasional, yakni sebesar 11,20 persen. Lebih jauh dapat diketahui dari Tabel 4.2, perkembangan tingkat kemiskinan menurut Provinsi di Pulau Jawa dengan periode tahun yang sama.

Gambar 4.2: **Rata-rata Persentase Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2011-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Tabel 4.2: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
DKI Jakarta	3,64	3,70	3,72	4,09	3,61	3,75	3,78	3,75
Jawa Barat	10,57	9,89	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	9,34
Jawa Tengah	16,21	14,98	14,44	13,58	13,32	13,19	12,23	13,99
D.I Yogyakarta	16,14	15,88	15,03	14,55	13,16	13,10	12,36	14,32
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85	11,20	12,47
Banten	6,26	5,71	5,89	5,51	5,75	5,36	5,59	5,72

Catatan: \*)  Rendah

\*\*)  Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Jika dilihat dari masing-masing provinsi, secara umum menunjukkan hasil yang sama dengan perkembangan tingkat kemiskinan Pulau Jawa, adanya tren penurunan pada periode tahun 2011-2017, kecuali Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, yang cenderung fluktuatif dan bahkan di tahun 2017 mengalami peningkatan. Selain itu berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di tahun 2017 ditempati oleh Provinsi D.I Yogyakarta dengan rata-rata 14,32 persen, disusul Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah capai oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata 3,75 persen. Di samping beberapa hal tersebut, dapat diketahui bahwa adanya kesenjangan pada tingkat kemiskinan di wilayah administratif Pulau Jawa. Terlihat perbedaan dari angka kemiskinan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi D.I Yogyakarta yang terpaut cukup jauh. Lebih lanjut perlu juga diketahui perkembangan tingkat kemiskinan menurut Kabupaten/Kota pada masing-masing provinsi.

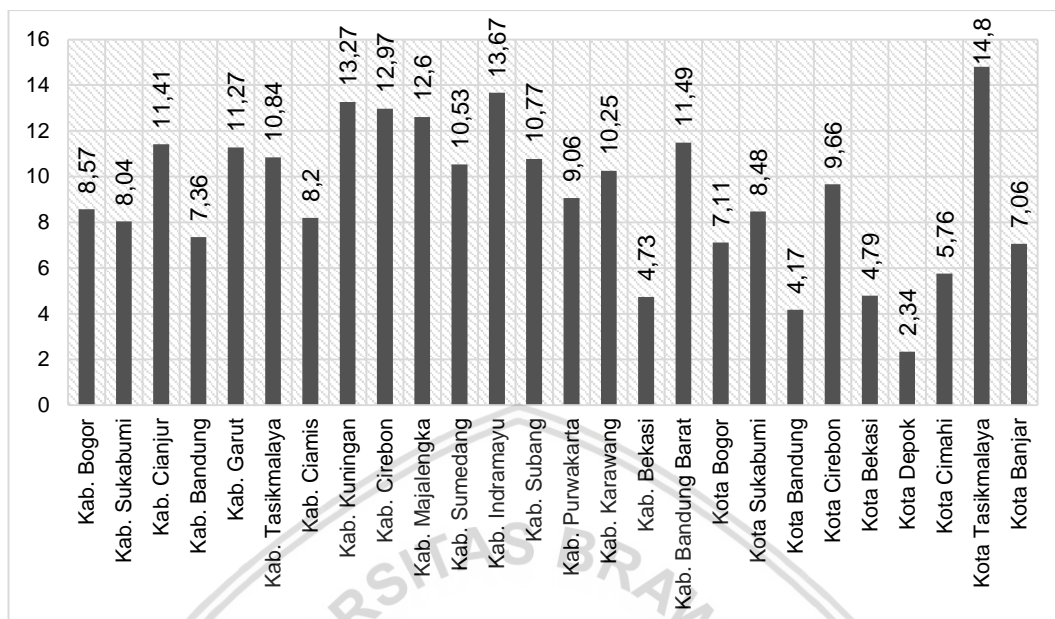
Gambar 4.3: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Gambar 4.3 memberikan informasi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2017, terdapat 2 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta (3,78%) yakni, Kabupaten Kepulauan Seribu (12,98%) dan Kota Jakarta Utara (5,59%). Angka kemiskinan yang ditunjukkan Kabupaten Kepulauan Seribu, yang terbilang sangat tinggi dibanding Kabupaten/Kota lain yang masih berada di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta, sekaligus menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah. Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 3,25 Persen.

Gambar 4.4: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017**



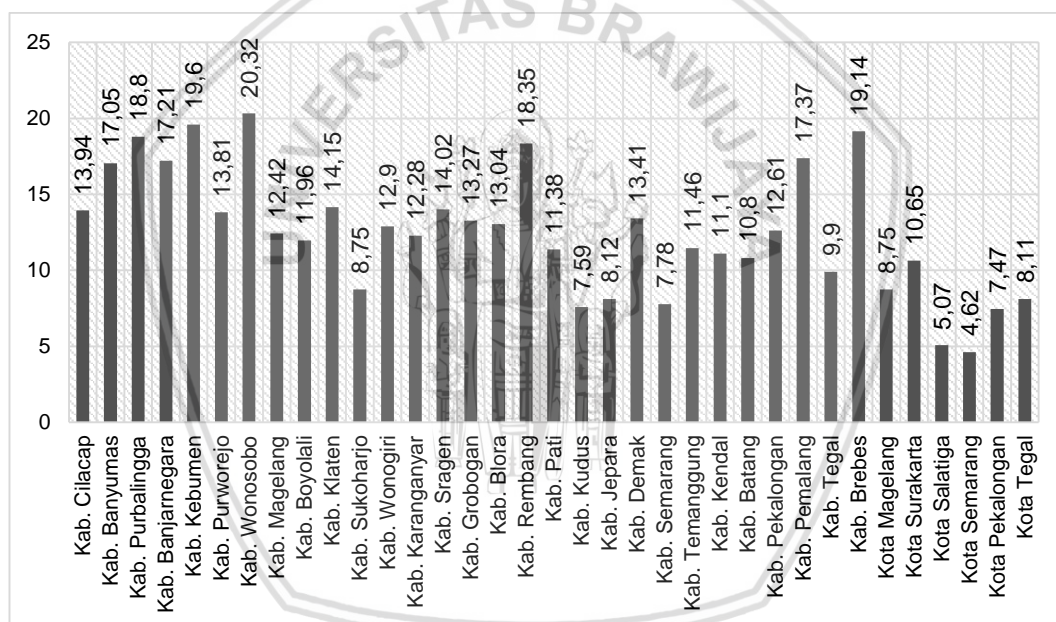
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Gambar 4.4 memberikan informasi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017, terdapat 18 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat (7,83%) yakni, Kabupaten Bogor (8,57%), Kabupaten Sukabumi (8,04%), Kabupaten Cianjur (11,41%), Kabupaten Garut (11,27%), Kabupaten Tasikmalaya (10,84%), Kabupaten Ciamis (8,20%), Kabupaten Kuningan (13,27%), Kabupaten Cirebon (12,97%), Kabupaten Majalengka (12,60%), Kabupaten Sumedang (10,53%), Kabupaten Indramayu (13,67%), Kabupaten Subang (10,77%), Kabupaten Purwakarta (9,06%), Kabupaten Karawang (10,25%), Kabupaten Bandung Barat (11,49%), Kota Sukabumi (8,48%), Kota Cirebon (9,66%), dan Kota Tasikmalaya (14,80%). Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat, Kota Depok dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 2,34 Persen.



Sama halnya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan adanya ketimpangan angka kemiskinan yang cukup lebar. Besarnya perbedaan angka tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Selain itu perlu diketahui bahwa wilayah penyumbang terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat yaitu didominasi oleh wilayah timur Jawa Barat, yang dapat dikatakan sebagai kantong-kantong kemiskinan Jawa Barat.

Gambar 4.5: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017**

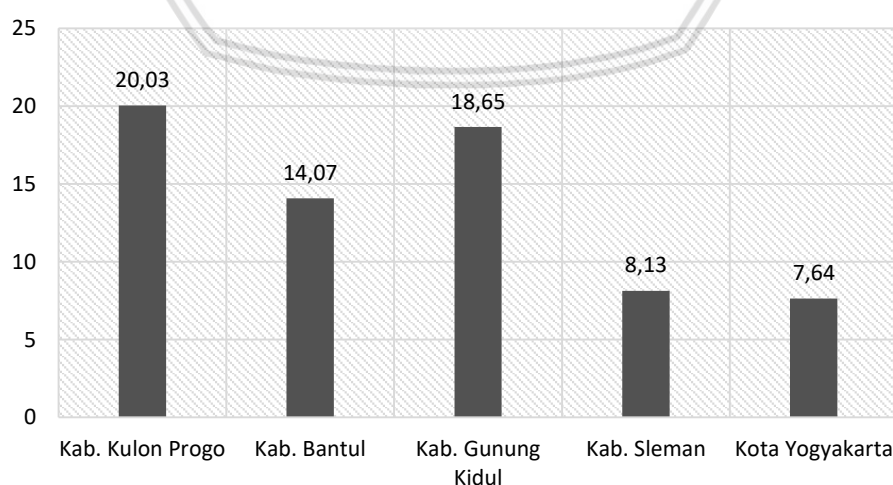


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Gambar 4.5 memberikan informasi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017, terdapat 19 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (12,23%) yakni, Kabupaten Cilacap (13,94%), Kabupaten Banyumas (17,05%), Kabupaten Purbalingga (18,80%), Kabupaten Banjarnegara (17,21%), Kabupaten Kebumen (19,60%), Kabupaten Purworejo (13,81%), Kabupaten Wonosobo (20,32%),

Kabupaten Magelang (12,42 %), Kabupaten Klaten (14,15%), Kabupaten Wonogiri (12,90%). Kabupaten Karanganyar (12,28%), Kabupaten Sragen (14,02%), Kabupaten Grobogan (13,27%), Kabupaten Blora (13,04%), Kabupaten Rembang (18,35%), Kabupaten Demak (13,41%), Kabupaten Pekalongan (12,61%), Kabupaten Pemalang (17,37%), dan Kabupaten Brebes (19,14%). Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 4,62 Persen. Seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan adanya ketimpangan angka kemiskinan yang cukup lebar. Besarnya perbedaan angka tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu perlu diketahui bahwa wilayah penyumbang terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu didominasi oleh wilayah pinggiran Jawa Tengah yang menyebar dari barat, utara, timur hingga selatan, yang dapat dikatakan sebagai kantong-kantong kemiskinan Jawa Tengah.

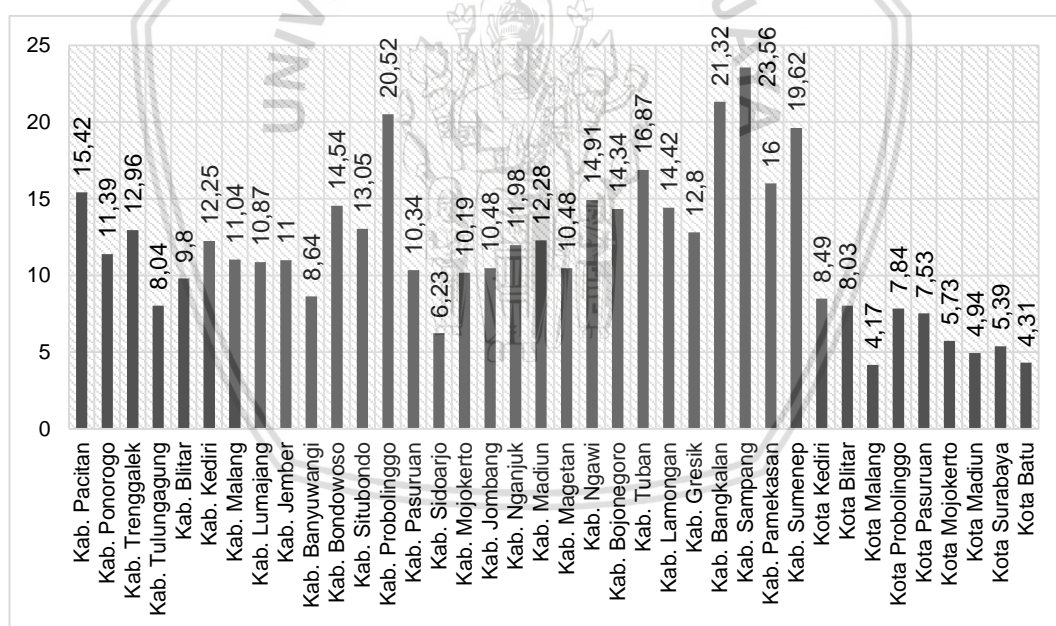
**Gambar 4.6: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Gambar 4.6 dapat menjelaskan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Pada tahun 2017, terdapat 3 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan Provinsi D.I Yogyakarta (12,36%) yakni, Kabupaten Kulon Progo (20,03%), Kabupaten Bantul (14,07%), dan Kabupaten Gunung Kidul (18,66%). Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi D.I Yogyakarta, Kota Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 7,64 Persen. Di samping itu, dapat diketahui tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2017 menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda antar Kabupaten/Kota wilayah administratif D.I Yogyakarta.

Gambar 4.7: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017**

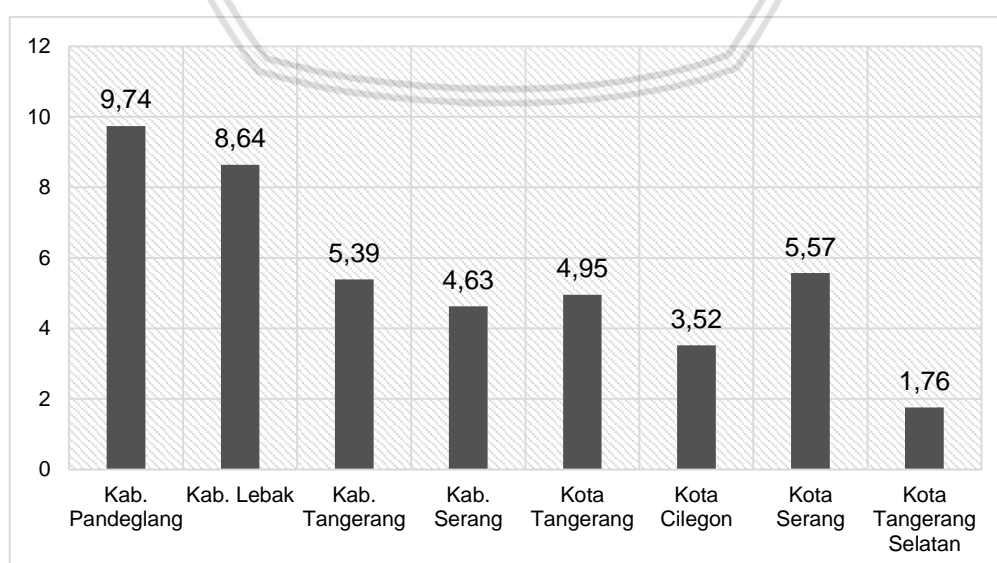


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Gambar 4.7 dapat menjelaskan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2017, terdapat 18 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur (11,20%) yakni, Kabupaten Pacitan (15,42%), Kabupaten Ponorogo (11,39%), Kabupaten Trenggalek (12,96%), Kabupaten Kediri (12,25%), Kabupaten Bondowoso

(14,54%), Kabupaten Situbondo (13,05%), Kabupaten Probolinggo (20,52%), Kabupaten Nganjuk (11,98%), Kabupaten Madiun (12,28%), Kabupaten Ngawi (14,91%), Kabupaten Bojonegoro (14,34%), Kabupaten Tuban (16,87%), Kabupaten Lamongan (14,42%), Kabupaten Gresik (12,80%), Kabupaten Bangkalan (21,32%), Kabupaten Sampang (23,56%), Kabupaten Pamekasan (16%), dan Kabupaten Sumenep (19,62%). Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur, Kota Malang dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 4,17 Persen. Di samping itu, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan adanya ketimpangan angka kemiskinan yang cukup lebar. Besarnya perbedaan angka tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Selain itu perlu diketahui bahwa wilayah penyumbang terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur yaitu didominasi oleh Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Madura, yang dapat dikatakan sebagai kantong-kantong kemiskinan Jawa Timur.

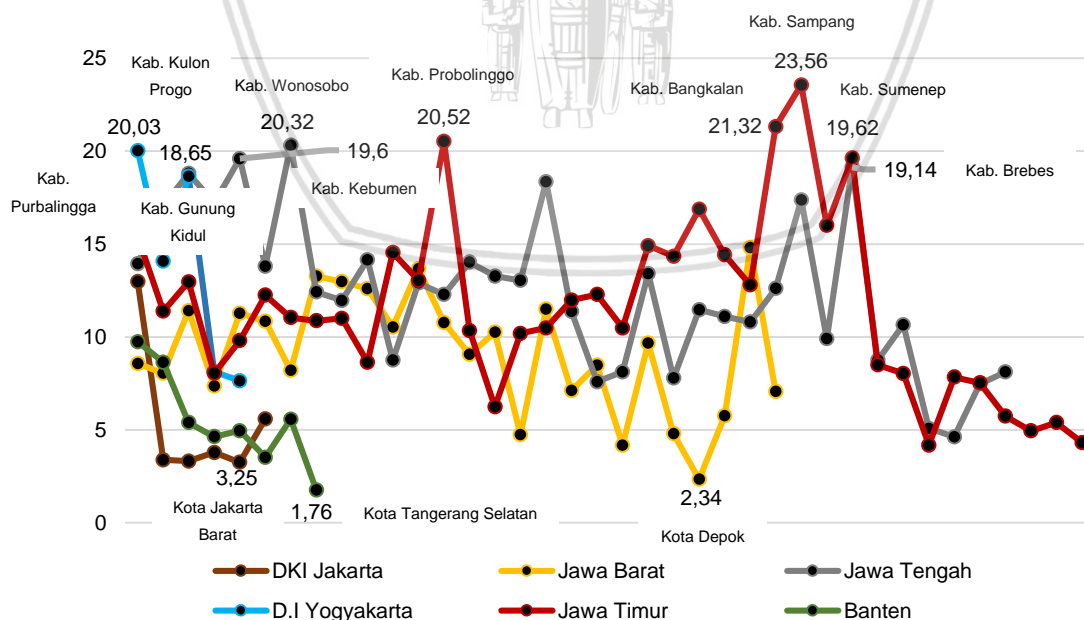
Gambar 4.8: **Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Gambar 4.8 memberikan informasi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Pada tahun 2017, terdapat 2 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan Provinsi Banten (5,59%) yakni, Kabupaten Pandeglang (9,74%) dan Kabupaten Lebak (8,64%). Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan dengan tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 1,76 Persen. Besarnya perbedaan angka tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Selain itu perlu diketahui bahwa wilayah penyumbang terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Banten yaitu didominasi oleh daerah selatan Provinsi Banten, yang dapat dikatakan sebagai kantong-kantong kemiskinan Banten.

**Gambar 4.9: Persentase Penduduk Miskin dengan Peringkat 10 Tertinggi Menurut Kabupaten/Kota Pulau Jawa Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).



Gambar 4.9 memberikan informasi 10 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan 3 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan terendah dari total Kabupaten/Kota wilayah administratif Pulau Jawa. Kantong-kantong kemiskinan di Pulau Jawa berada di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Sampang yang mencapai 23,56 persen, diikuti Kabupaten Bangkalan (21,32%), Kabupaten Probolinggo (20,52%), Kabupaten Wonosobo (20,32%), Kabupaten Kulon Progo (20,03%), Kabupaten Sumenep (19,62%), Kabupaten Kebumen (19,60%), Kabupaten Brebes (19,14%), Kabupaten Purbalingga (18,80%), dan terakhir Kabupaten Gunung Kidul (18,65%). Kabupaten/Kota tersebut menempati peringkat 10 besar tingkat kemiskinan tertinggi dari total 118 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Sedangkan 3 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan terendah yakni, Kota Jakarta Barat (3,25%), Kota Depok (2,34%), dan Kota Tangerang Selatan (1,76%). Lebih dari itu, fakta besarnya perbedaan angka tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Pulau Jawa menunjukkan bahwa, terdapat kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa.

#### **4.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Sehingga indikator baik atau buruknya perekonomian suatu negara dan tolak ukur kesejahteraan masyarakat dicerminkan dari pertumbuhan ekonominya. Walaupun pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya indikator yang mampu menjelaskan kinerja perekonomian, namun indikator pertumbuhan ekonomi dapat memberikan suatu gambaran aktivitas perekonomian suatu negara. Berikut Tabel 4.3 perkembangan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2011-2017.



Tabel 4.3: **Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
DKI Jakarta	6,73	6,53	6,07	5,91	5,91	5,88	6,22	6,18
Jawa Barat	6,50	6,50	6,33	5,09	5,05	5,66	5,29	5,77
Jawa Tengah	5,30	5,34	5,11	5,27	5,47	5,27	5,27	5,29
D.I Yogyakarta	5,21	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,21
Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,57	5,45	5,93
Banten	7,03	6,83	6,67	5,51	5,45	5,28	5,71	6,07

Catatan: \*)  Tinggi  
 \*\*)  Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing provinsi dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif dan lamban. Di samping itu, dapat diketahui provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata tertinggi di capai oleh Provinsi DKI Jakarta yakni pertumbuhannya mencapai 6,18 persen. Sedangkan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah ditempati Provinsi D.I Yogyakarta yakni 5,21 persen. Kemudian akan disajikan perkembangan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2011-2017.

Tabel 4.4: **Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita ADHK 2010 Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
DKI Jakarta	5,51	5,34	4,92	4,81	4,84	4,85	5,23	5,07
Jawa Barat	4,78	4,82	4,70	3,52	3,52	4,16	3,84	4,19
Jawa Tengah	4,40	4,47	4,27	4,46	4,68	4,52	4,53	4,48
D.I Yogyakarta	3,94	4,11	4,23	3,95	3,75	3,87	4,11	4,00

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Jawa Timur	5,66	5,90	5,37	5,18	4,80	4,96	4,86	5,25
Banten	4,53	4,40	4,31	3,24	3,24	3,14	3,63	3,78

Catatan: \*)  Tinggi  
 \*\*)  Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

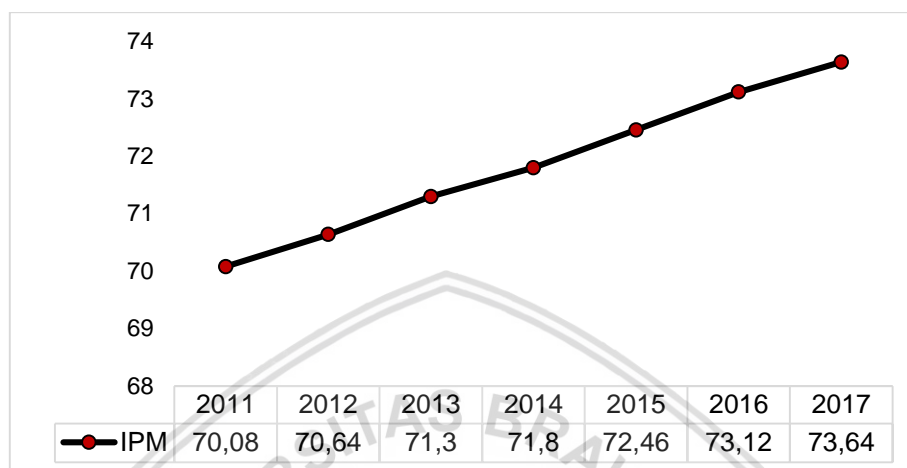
Tabel 4.4 memberikan informasi perkembangan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2011-2017. Sama halnya laju PDRB, laju PDRB per kapita menunjukkan untuk masing-masing provinsi dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif dan lamban. Berbeda dengan pertumbuhan PDRB sebelumnya, di mana Provinsi DKI Jakarta yang mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi, diketahui rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi dicapai oleh Provinsi Jawa Timur yakni pertumbuhannya mencapai 5,25 persen. Sedangkan provinsi dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita terendah ditempati Provinsi Banten yakni 3,78 persen.

#### 4.1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yang digunakan sebagai indikator yaitu (i) bidang kesehatan: usia hidup (*longevity*); (ii) bidang pendidikan: pengetahuan (*knowledge*); dan (iii) bidang ekonomi: standar hidup layak (*decent living*). IPM menjadi Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu kebijakan ekonomi suatu negara terhadap

kualitas hidup warganegaranya. Berikut Gambar 4.10, rata-rata perkembangan IPM Pulau Jawa periode tahun 2011-2017.

**Gambar 4.10: Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017**



Catatan: \*) IPM kategori tinggi (IPM > 80)

\*\*) IPM kategori menengah ke atas ( $66 < \text{IPM} < 80$ )

\*\*\*) IPM kategori menengah bawah ( $50 < \text{IPM} < 66$ )

\*\*\*\*) IPM kategori rendah (IPM < 50)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Gambar 4.10 menunjukkan perkembangan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017, terus mengalami peningkatan. Tingkat pencapaian pembangunan manusia di Pulau Jawa yang diukur dengan IPM selama tahun 2011-2017 secara keseluruhan menunjukkan adanya perbaikan. Begitupun jika dilihat pada Tabel 4.5 berdasarkan masing-masing provinsi di Pulau Jawa, IPM menunjukkan perkembangan yang positif. IPM Pulau Jawa sendiri, berdasarkan klasifikasi IPM yang telah ditetapkan BPS, provinsi di Pulau Jawa berada pada kategori menengah atas yakni kisaran 66 - 80.

Tabel 4.5: **Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
DKI Jakarta	76,98	77,53	78,08	78,39	78,99	79,60	80,06	78,52
Jawa Barat	66,67	67,32	68,25	68,80	69,50	70,05	70,69	68,75
Jawa Tengah	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52	68,66
D.I Yogyakarta	75,93	76,15	76,44	76,81	77,59	78,38	78,89	77,17
Jawa Timur	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27	68,21
Banten	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42	69,88

Catatan: \*)  Tinggi  
 \*\*)  Rendah

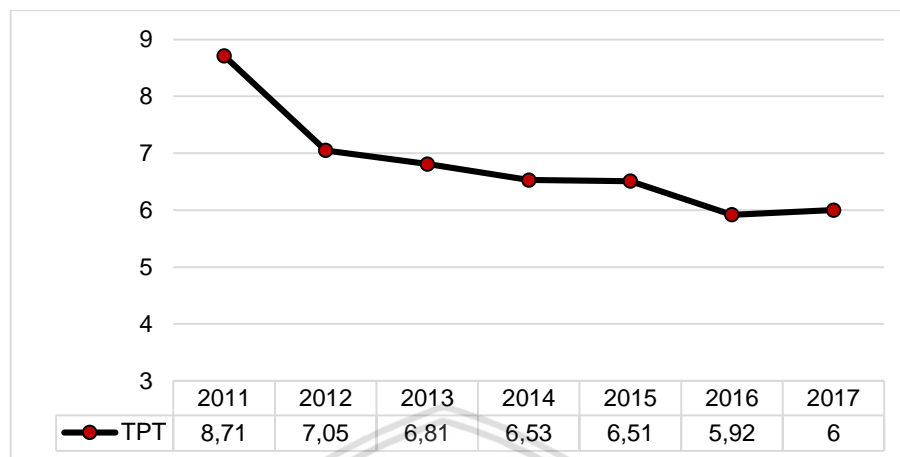
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Tabel 4.5 memberikan informasi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi di Pulau Jawa mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2017, bahwa IPM terus mengalami kenaikan. Rata-rata IPM tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar 78,52. Sedangkan rata-rata IPM terendah berada di Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 68,21.

#### 4.1.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT seringkali digunakan sebagai ukuran dalam melihat kondisi penganggur di berbagai wilayah. Berikut rata-rata TPT Pulau Jawa periode tahun 2011-2017.

**Gambar 4.11: Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pulau Jawa Tahun 2011-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Gambar 4.11 menunjukkan perkembangan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pulau Jawa mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, bahwa TPT dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Akan tetapi tidak ditahun 2017. Namun jika dilihat dalam Tabel 4.6 dari masing-masing provinsi di Pulau Jawa, rata-rata TPT berfluktuatif.

**Tabel 4.6: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2017**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
DKI Jakarta	11,69	9,67	8,63	8,47	7,23	6,12	7,14	8,42
Jawa Barat	9,96	9,08	9,16	8,45	8,72	8,89	8,22	8,92
Jawa Tengah	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	4,63	4,57	5,51
D.I Yogyakarta	4,39	3,90	3,24	3,33	4,07	2,72	3,02	3,52
Jawa Timur	5,38	4,11	4,30	4,19	4,47	4,21	4,00	4,38
Banten	13,74	9,94	9,54	9,07	9,55	8,92	9,28	10,00

Catatan: \*)  Rendah

\*\*)  Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Tabel 4.6 memberikan informasi perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut provinsi di Pulau Jawa mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, bahwa nilai TPT dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang berfluktuatif. Rata-rata TPT tertinggi dicapai oleh Provinsi Banten yakni sebesar 10 persen. Sedangkan rata-rata TPT terendah berada di Provinsi D.I Yogyakarta yakni sebesar 3,52 persen. Terlihat selisih dari angka TPT yang cukup besar antar daerah di Pulau Jawa.

## 4.2 Hasil Penelitian

Hasil analisis data, yang merupakan hasil dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan. Berguna untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2011-2017.

### 4.2.1 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel merupakan langkah awal dari tahapan pengujian. Pemilihan model diperlukan untuk menentukan model terbaik sekaligus yang paling tepat, yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pemilihan model sendiri dilakukan dengan 3 kali pengujian diantaranya, *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test*.

#### Hasil *Chow Test*

Uji pemilihan model regresi data panel yang pertama adalah *chow test*, yang digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.



Gambar 4.12: Hasil **Chow Test**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: FE  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	432.202203	(117,705)	0.0000

Catatan: \*) Prob. Cross-section  $F > \alpha$  5% ( $\alpha = 0.05$ ): Random Effect Model

\*\*) Prob. Cross-section  $F < \alpha$  5% ( $\alpha = 0.05$ ): Fixed Effect Model

Sumber: Data olahan menggunakan Eviews Student Version 10, 2018.

Berdasarkan Gambar 4.12, *chow test* yang dilakukan diperoleh nilai Prob. Cross-section Chi-square  $< \alpha$  5% ( $\alpha = 0.05$ ) yaitu sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih yakni *fixed effect model*. Namun, masih belum bisa dikatakan model *fixed effect* yang terbaik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 macam uji pemilihan model regresi data panel. Sehingga masih diperlukan pengujian pemilihan model selanjutnya.

#### Hasil Hausman Test

*Hausman test* merupakan uji pemilihan model yang digunakan untuk menentukan model terbaik sekaligus yang paling tepat untuk digunakan antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model* dalam mengestimasi data panel.

Gambar 4.13: Hasil **Hausman Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: RE  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	59.429102	3	0.0000

Catatan: \*) Prob. Cross-section random  $> \alpha$  5% ( $\alpha = 0.05$ ): Random Effect Model

\*\*) Prob. Cross-section random  $< \alpha$  5% ( $\alpha = 0.05$ ): Fixed Effect Model

Sumber: Data olahan menggunakan Eviews Student Version 10, 2018.

Berdasarkan Gambar 4.13 *hausman test* yang dilakukan diperoleh nilai *Prob. Cross-section random* <  $\alpha$  5% ( $\alpha = 0.05$ ) yaitu sebesar 0,0000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih yakni *fixed effect model*. Dari hasil *hausman test* ini sekaligus dapat langsung ditarik kesimpulan akhir untuk pemilihan model regresi data panel yang terbaik guna penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Tabel 4.7: **Kesimpulan Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Uji	Nilai	Keputusan
<i>Chow Test</i>	<i>Prob. Chisquare/ Cross-sectionF</i>	<i>Fixed Effect</i>
<i>Hausmant Test</i>	<i>Prob. Cross-section random</i>	<i>Fixed Effect</i>

Sumber: Data olahan menggunakan Eviews *Student Version* 10, 2018.

Berdasarkan Tabel 4.7, mendapatkan kesimpulan bahwa model terpilih dan terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect*. Karena dari kedua uji pemilihan model memberikan hasil yang sama yakni *fixed effect model*, maka Uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak perlu dilakukan.

#### 4.2.2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, dari hasil uji pemilihan model bahwa model terpilih untuk regresi data panel pada penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut Tabel 4.8 adalah hasil pengolahan data panel penelitian ini:

Tabel 4.8: Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) Metode Panel EGLS (*Cross-section weights*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
PE	-0,021854	0,014066	-1,553734	0,1207	Tidak Signifikan
IPM	-0,483269	0,011326	-42,66721	0,0000	Signifikan
TPT	0,035335	0,011312	3,123535	0,0019	Signifikan
Constanta	45,07218	0,841518	53,56056	0,0000	
<i>R-squared</i> : 0,992370					
<i>Prob. F-statistic</i> : 0,000000					

Catatan: \*) Sign. 5%.

Sumber: Data olahan menggunakan Eviews *Student Version* 10, 2018.

Hasil estimasi Tabel 4.8 menunjukkan nilai *R-squared* ( $R^2$ ) atau koefisien determinasi dengan nilai sebesar 0,992370. Besaran nilai *R-squared* tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), mampu menjelaskan varians dari variabel terikat yakni tingkat kemiskinan (TK) di Pulau Jawa sebesar 99,23%. Sisanya sebesar 0,77% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji F atau simultan, diketahui nilai *Prob. F-statistic* sebesar 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil atau kurang dari alpha 5% ( $\alpha = 0,05$ ), yang dapat diartikan bahwa variabel bebas yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yakni tingkat kemiskinan (TK) di Pulau Jawa.

Hasil uji t atau parsial dengan alpha 5% ( $\alpha = 0,05$ ), menunjukkan terdapat dua variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan (TK) yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara berurutan nilai *Prob.* < alpha 5% ( $\alpha = 0,05$ ), dari kedua variabel tersebut sebesar 0,0000 dan 0,0019. Kemudian satu variabel berpengaruh akan tetapi tidak signifikan terhadap variabel dependen tingkat kemiskinan (TK) yakni pertumbuhan ekonomi (PE), dengan nilai *Prob.* > alpha 5% ( $\alpha = 0,05$ ) yakni sebesar 0,1207. Namun jika alpha ditentukan sebesar 15% ( $\alpha = 0,15$ ), maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Nilai koefisien dari pertumbuhan ekonomi (PE) yakni sebesar -0,021854. Dengan asumsi variabel bebas lainnya memiliki nilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan sebesar 1% pada pertumbuhan ekonomi, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,02%. Nilai koefisien dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni sebesar -0,483269. Dengan asumsi variabel bebas lainnya memiliki nilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan sebesar 1% pada IPM, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,48%. Nilai koefisien dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni sebesar 0,035335. Dengan asumsi variabel bebas lainnya memiliki nilai nol (0), sehingga setiap terjadi kenaikan sebesar 1% pada TPT, maka akan terjadi kenaikan pada tingkat kemiskinan sebesar 0,04%.

#### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada sub-bab ini akan dipaparkan pembuktian hipotesis yang telah ditentukan berdasarkan teori, serta analisis hasil regresi dengan kondisi faktual yang terjadi di daerah-daerah yang menjadi ruang lingkup penelitian.

#### 4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Secara sederhana pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkat Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditingkat daerah, dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada pencapaian pada masa sebelumnya.

Sejak pemerintahan orde baru sampai dengan sekarang, keberhasilan perkembangan ekonomi selalu dikaitkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak *multiplier* yang besar terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Terutama terhadap beberapa permasalahan ekonomi dan sosial salah satunya yakni Kemiskinan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan terjadi proses transformasi yang bersifat struktural dalam perekonomian dan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk golongan masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi direspon oleh tingkat kemiskinan, namun tidak signifikan. Adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih tidak sepenuhnya mampu dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Dengan kata lain adanya peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, hanya sedikit

atau tidak banyak mempengaruhi terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan, dibanding dengan variabel lain. Sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. BPS mencatat secara lengkap kinerja ekonomi 2017, secara sektoral donasi terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan rata-rata 27,45 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 14,13 persen, konstruksi 10,19 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 8,58 persen, transportasi dan pergudangan 5,42 persen, dan terendah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 0,08 persen. Berdasarkan Tabel 4.9, memperlihatkan bahwa sektor *tradeable* yakni sektor industri dan sektor pertanian dalam arti luas masih menjadi bagian penyokong terbesar ekonomi Pulau Jawa.

Tabel 4.9: **Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Pulau Jawa Tahun 2017 (Persen)**

Lapangan Usaha	Distribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,58	1,86
Pertambangan dan Penggalian	1,58	2,25
Industri Pengolahan	27,45	5,37
Pengadaan Listrik dan Gas	0,60	2,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	5,63
Konstruksi	10,19	6,93
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,13	5,73
Transportasi dan Pergudangan	5,42	6,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,87	7,20
Informasi dan Komunikasi	5,03	9,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,29	3,88
Real Estate	4,15	6,14
Jasa Perusahaan	1,88	7,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	2,00
Jasa Pendidikan	4,47	6,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	7,20
Jasa Lainnya	2,17	7,68
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>5,53</b>



Catatan: \*)  Tinggi  
 \*\*)  Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Dari sisi pertumbuhan sektoral, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi 9,54 persen, diikuti sektor jasa perusahaan 7,44 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 7,20 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 7,20 persen, konstruksi 6,93 persen, dan transportasi dan pergudangan 6,66 persen. Sementara itu sektor industri pengolahan tumbuh 5,37 persen, hal yang sama juga terjadi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang pertumbuhannya jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yakni hanya 1,86 persen. Dengan begitu, pola pertumbuhan sektoral didominasi oleh *non-tradeable sector*.

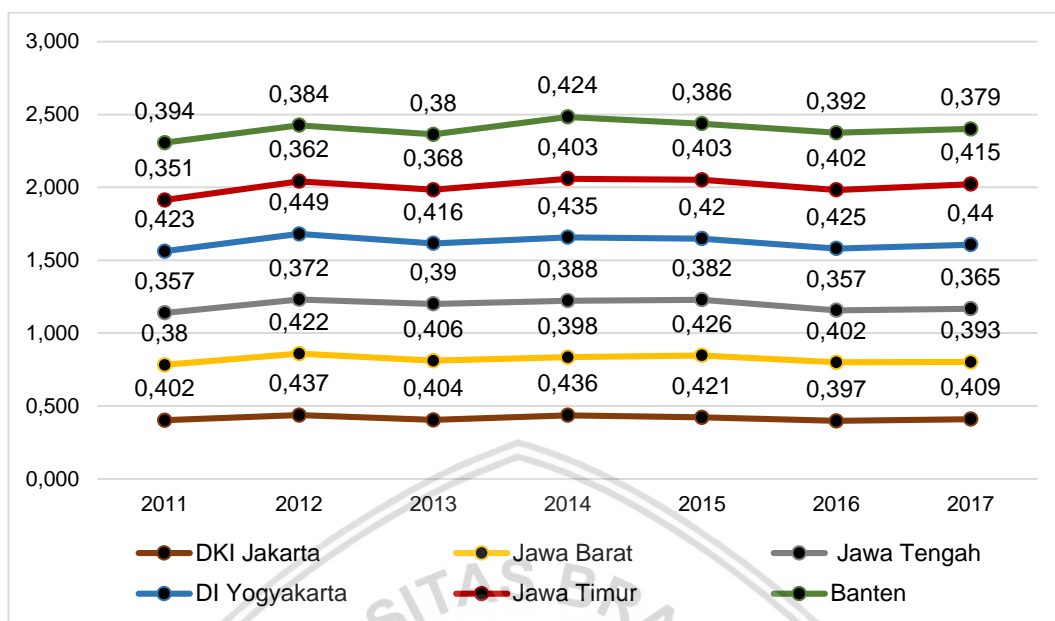
Meskipun pertumbuhan ekonomi ini relatif tinggi, namun banyak pihak yang belum dapat menikmati tingginya pertumbuhan ekonomi ini. Problema pertumbuhan bisa dilihat dari struktur sumbangan sektoral. Sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, donasinya terhadap PDRB terus merosot sejak 3 tahun terakhir (**Lampiran 6**). Namun, khusus sektor pertanian ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah kontribusinya terhadap PDRB jika menurun, asalkan diikuti dengan penurunan beban tenaga kerja atau tenaga kerja di sektor tersebut. Masalahnya, penurunan kontribusi terhadap PDRB tidak selaras dengan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Maka penurunan donasi sektor industri pengolahan dan pertanian terhadap PDRB merupakan kondisi yang mengkhawatirkan terutama dalam jangka panjang, karena kedua sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.

Ketimpangan di Pulau Jawa bisa dilihat dari dari tiga sisi, yaitu ketimpangan sektoral, daerah, dan individu. Ketimpangan sektoral, di mana sektor *non-tradeable* menikmati pertumbuhan yang tinggi, sebaliknya sektor *tradeable*

yakni sektor industri, pertanian, dan pertambangan pertumbuhannya relatif rendah. Hal ini yang kemudian memicu ketimpangan pendapatan antar penduduk. Sektor *non-tradeable* tumbuh tinggi tapi hanya menampung sedikit tenaga kerja, sehingga mereka yang terlibat didalamnya menikmati pendapatan yang tinggi. Hal yang berbeda terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian yang tumbuh rendah, namun penyerapan tenaga kerjanya sebaliknya tinggi. Konsekuensinya mereka yang terlibat dikedua sektor tersebut hanya menerima pendapatan yang rendah.

Hal tersebut dapat dijelaskan oleh data ketimpangan yakni Rasio Gini pada Gambar 4.14, rata-rata masing-masing provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2017 mengalami kenaikan dan termasuk dalam kategori sedang. Jadi, dengan tambahan data ini sebetulnya kenaikan pendapatan per kapita yang terus berlangsung dari tahun ke tahun tidak banyak berarti karena penikmat kenaikan itu hanya sebagian kecil masyarakat. Sementara itu ketimpangan antar daerah di Pulau Jawa sendiri juga masih tinggi, di mana DKI Jakarta menyumbang 29,81 persen, Jawa Barat 22,09 persen, Jawa Tengah 14,68 persen, D.I Yogyakarta 1,47 persen, Jawa Timur 24,97 persen, Banten 6,98 persen.

Gambar 4.14: Gini Rasio Menurut Provinsi Pulau Jawa Tahun 2011-2017



Catatan: \*)  $G < 0,3$  = Ketimpangan Rendah

\*\*)  $0,3 \leq G \leq 0,5$  = Ketimpangan Sedang

\*\*)  $G > 0,5$  = Ketimpangan Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Singkatnya, yang menjadi masalah adalah melebarnya ketimpangan ekonomi antar penduduk dalam masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami mengapa meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, sedangkan kemiskinan dalam masyarakat semakin bertambah. Hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah, jika ketimpangan pendapatan antar penduduk sudah semakin lebar, akan dapat kecenderungan mengaburnya pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran dari pada pembangunan itu sendiri. Artinya, setiap kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan per kapita, pada saat yang sama bisa jadi sedang berlangsung proses pemiskinan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuhdiyaty dan Kaluge (2017), bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 33 Provinsi di Indonesia pada

periode tahun 2011-2015. Sejalan dengan ini, Arsyad (2010) menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan “*trickle down effects*” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Apabila tidak ada pemerataan maka yang akan menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi ini adalah masyarakat yang mempunyai modal yang besar dan masyarakat dari golongan atas. Dilema yaitu antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan distribusi pendapatan, ini menjadi masalah yang telah lama dan harus dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang. *Trade off* atau pertukaran antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan di masing-masing daerah selalu terjadi.

Dengan demikian penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, yang dilakukan pada Pulau Jawa ini masih sejalan dengan teori sekaligus hipotesis penelitian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara teoretis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini ketika terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan menurun.

Hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tersebut ditemukan di beberapa negara. Kajian yang mendukung teori namun tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian, ini dilakukan pada 45 Negara di Asia Timur dan Selatan, Amerika Latin dan Karibia, serta Afrika Sub-Sahara. Misalnya Hasan dan Quibria, dalam Tambunan (2015) yang menguji secara empiris dampak dari pola pertumbuhan output terhadap penurunan kemiskinan, ada suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan dan kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, negara-negara dengan tingkat Pendapatan

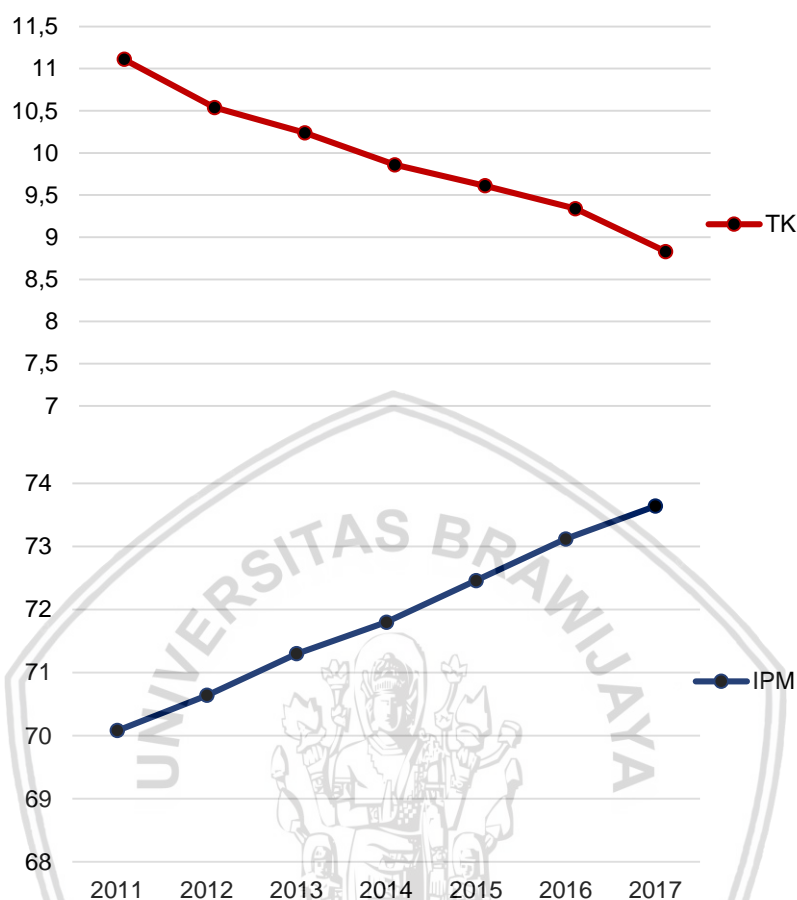
Nasional per kapita yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tingkat Pendapatan Nasional per kapitanya lebih rendah.

Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh Alberto Javier Iniguez-Montiel (2014) di Mexico pada periode tahun 1992-2008, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang begitu sebaliknya. Artinya adanya hubungan atau pola yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Hal tersebut juga tampak pada penelitian dalam negeri yang dilakukan oleh Alhudori (2017), bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi periode tahun 2010-2015. Sehingga hasil penelitian ini memberikan penjelasan, bahwa permasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*), namun lebih dari itu penting untuk diketahui apa yang terjadi di dalam Pertumbuhan Ekonomi tersebut.

#### **4.3.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) direspon oleh tingkat kemiskinan, dengan pola yang negatif. Artinya adanya peningkatan IPM mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada, begitu pun sebaliknya. Fakta hasil pengujian statistik ini didukung oleh fakta empirik dari perbandingan kedua variabel, IPM dan tingkat kemiskinan (TK). Gambar 4.15, hasil pengujian statistik yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan tersebut tampak pada perbandingan kedua variabel, yang menunjukkan bahwa adanya pola yang tidak searah atau berlawanan antara IPM dan tingkat kemiskinan. Secara umum IPM yang tinggi mempunyai kecenderungan dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Gambar 4.15: **Perbandingan Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Pulau Jawa Tahun 2011-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Sejalan dengan pernyataan Arsyad (2010), bahwa salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun. Selain itu Ginting, *et. al* (2008), menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau, sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

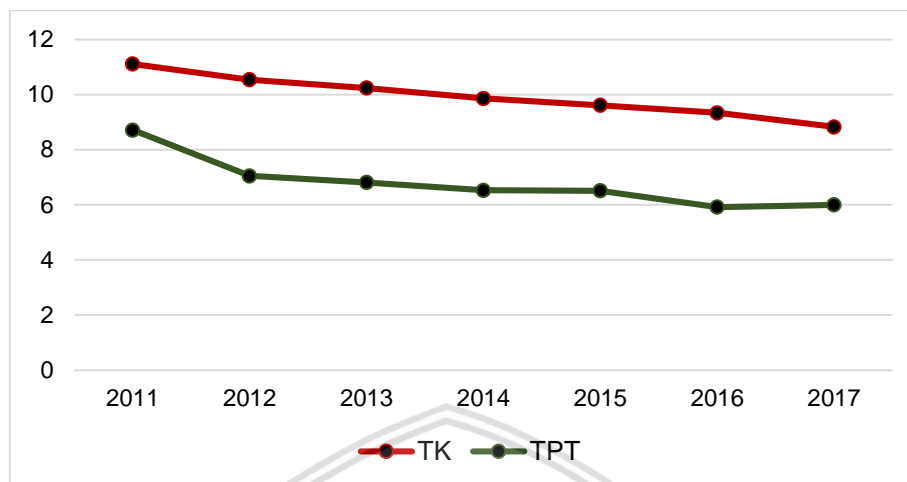


Dengan demikian, penelitian pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan yang dilakukan di Pulau Jawa ini sesuai dengan teori sekaligus hipotesis penelitian. Secara teoretis, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya tingkat kemiskinan akan bergerak dengan pola yang negatif dengan IPM. Dalam hal ini ketika terjadi peningkatan pada IPM maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan menurun. Hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dan IPM tersebut ditemukan di beberapa kajian. Kajian yang mendukung teori dan yang sejalan dengan temuan penelitian ini dilakukan di tingkat Nasional pada 33 Provinsi di Indonesia periode tahun 2011-2015, oleh Zuhdiyaty dan Kaluge (2017), bahwa ada suatu korelasi negatif signifikan antara IPM dan kemiskinan.

#### **4.3.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan**

Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) direspon oleh tingkat kemiskinan dengan pola yang positif. Artinya adanya penurunan TPT dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada, begitu sebaliknya. Fakta hasil pengujian statistik ini didukung oleh fakta empirik dari TPT dan tingkat kemiskinan (TK). Gambar 4.16, hasil pengujian statistik yang menunjukkan pengaruh positif signifikan tersebut tampak pada perbandingan kedua variabel, yang menunjukkan bahwa adanya pola yang searah antara TPT dan tingkat kemiskinan. Secara umum TPT yang rendah mempunyai kecenderungan yang diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Gambar 4.16: **Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa Tahun 2011-2017**



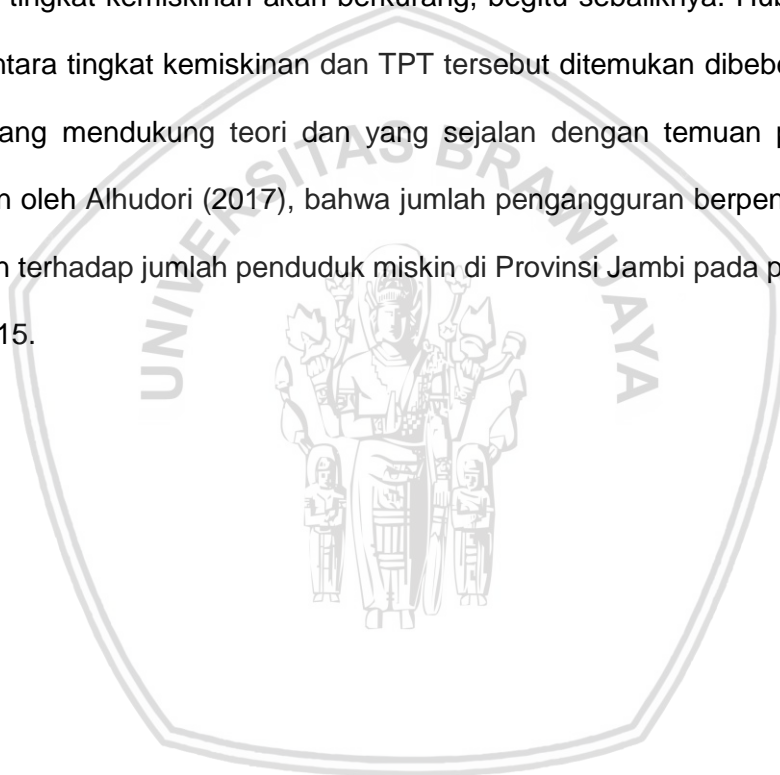
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

Mendukung pernyataan Sukirno (2006) bahwa, besarnya tanggungan tanpa pendapatan yang memadai membatasi kemampuan keluarga untuk menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan pokok. Salah satu faktor terpenting adalah pendapatan yang diperoleh masyarakatnya, di mana pendapatan akan diperoleh seseorang ketika bekerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai alat ukur kemakmuran suatu negara, yang memiliki korelasi positif. Artinya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu negara, begitu pun sebaliknya.

Lebih dari itu, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Sukirno, 2006). Dengan

pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa orang yang menganggur pasti lebih mudah menjadi miskin dari pada orang yang tidak menganggur.

Dengan demikian, penelitian pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan, yang dilakukan di Pulau Jawa ini sesuai dengan teori sekaligus hipotesis penelitian. Secara teoretis, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya tingkat kemiskinan akan bergerak dengan pola yang positif dengan TPT. Dalam hal ini ketika terjadi penurunan pada TPT maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan berkurang, begitu sebaliknya. Hubungan yang positif antara tingkat kemiskinan dan TPT tersebut ditemukan di beberapa kajian. Kajian yang mendukung teori dan yang sejalan dengan temuan penelitian ini dilakukan oleh Alhudori (2017), bahwa jumlah pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi pada periode tahun 2010-2015.



## BAB V

### PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pernyataan singkat tentang hasil penelitian serta memberikan pilihan solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

#### 5.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017. Hal ini mengindikasikan bahwa, kurangnya kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi, karena masih tidak sepenuhnya mampu dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pola pertumbuhan sektoral yang didominasi oleh *non-tradeable sector*. Di mana akhirnya memicu ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar penduduk dalam masyarakat.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan dari IPM direspon penuh dengan penurunan tingkat kemiskinan yang ada. Secara lebih luas, peningkatan kualitas dari dimensi IPM yakni Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi memberikan manfaat pada penurunan tingkat kemiskinan.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa pada periode tahun 2011-2017. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan dari TPT direspon penuh dengan penurunan tingkat kemiskinan yang ada.

## 5.2 Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran untuk direkomendasikan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang ada, maka diharapkan kebijakan Pemerintah lebih mengarah pada fungsi distribusi yang memihak kepada masyarakat miskin. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada kelompok penduduk miskin jika dibarengi dengan suatu pengurangan kesenjangan. Dengan kata lain, pangsa pendapatan dari kelompok miskin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih mengupayakan untuk pertumbuhan pada *tradeable sector*. Lebih dari itu untuk setiap daerah di Pulau Jawa, penting untuk meningkatkan pertumbuhan sektor yang menjadi potensi lokal, akan tetapi dengan mempertimbangkan manfaat yang diberikan kepada seluruh pihak terutama pada kelompok masyarakat miskin. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan ke depan bukan lagi pertumbuhan ekonomi yang eksklusif melainkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga harapan kedepannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan kontribusi penuh terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang ada.
2. Merujuk pada teori pertumbuhan baru, yang menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan manusia, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya, terutama teruntuk masyarakat miskin pedesaan. Pasalnya investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM) akan memperbaiki standar hidup baik di desa maupun perkotaan. Meningkatnya produktivitas manusia, pada akhirnya dapat membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan yakni kemiskinan.

Selain itu, mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia itu sendiri.

3. Mengetahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyumbang penuh terhadap tingkat kemiskinan, Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya, diharapkan melakukan peningkatan kesempatan kerja guna mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja dan peningkatan upah dari kelompok penduduk miskin. Dengan kata lain, salah satu cara atau mekanisme utama dalam mengurangi kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja berupa yang memadai bagi kelompok penduduk miskin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan, berupaya untuk terus mengurangi hambatan administratif bagi kegiatan perekonomian, seperti perizinan. Dengan mengurangi kontrol dan hambatan masuk (*entry barrier*), akan mendorong terciptanya lapangan kerja. Satu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa koordinasi antara berbagai Kementrian dan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan agar tidak ada peraturan yang saling tumpang tindih. Selain itu, peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel akan berperan penting dalam menyediakan peluang kerja. Selanjutnya penyederhanaan atas perlindungan kerja yang ketat, termasuk prosedur pemberhentian, dan pembayaran pesangon, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas pelatihan kejuruan dan layanan penempatan kerja. Hal tersebut akan mendorong ketenagakerjaan muda dan mengurangi perekrutan pekerja kontrak jangka pendek.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alhudori, M. 2017. *Pengaruh IPM, PDRB, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi*. *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business* Vol. 1 No. 1. (<https://media.neliti.com/media/publications>). Diakses pada 07 Mei 2018.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Indonesia dalam Infografis 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Persentase Penduduk Miskin, 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Jumlah Penduduk Miskin, 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Gini Ratio, 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2017*. Diakses pada 01 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2017 (Persen)*. Diakses pada 01 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2017 (Persen)*. Diakses pada 01 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia, 2011-2017 (Metode Baru)*. Diakses pada 01 September 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2011-2017*. Diakses pada 01 September 2018.

- Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2018. *Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kota*. Bandung: Bappeda Jabar.
- Bappeda, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2018. *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Bappeda Jatim.
- Kementrian PPN/Bappenas. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku III Agenda Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Kementrian PPN/Bappenas.
- Cese, K.E, & Fair, R.C. 2008. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 2, Edisi 8*. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ginting, Charisma K. S., Irsad Lubis, & Kasyful Mahalli. 2008. *Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Vol. 04 No. 1, Wahana Hijau. (<http://repository.usu.ac.id>). Diakses pada 3 Mei 2018.
- Giovanni, Ridzky. 2018. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016*. Economics Development Analysis Journal Vol. 7 No. 1. (<http://journal.unnes.ac.id>). Diakses pada 07 April 2018.
- Gujarati, Damodar N. & Dawn C. Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 2, Edisi Kelima*. Terjemahan: Raden Carlos M. 2011. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Sayuti. 1996. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hendrani, Pilar. 2012. *Konvergensi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten*. Bogor: Tesis, Institut Pertanian Bogor. (<https://repository.ipb.ac.id>). Diakses pada 27 Mei 2018.
- Jhingan, M. L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw, N Gregory, Euston Quah, & Peter Wilson. 2008. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.

- Montiel, Alberto Javier Iniguez. 2014. *Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth (1992-2008)*. World Development Vol. 59, pp. 313-326. ([www.elsevier.com/locate/worlddev](http://www.elsevier.com/locate/worlddev)). Diakses pada 03 Mei 2018.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Tambunan, Tulus T.H. 2015. *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vries, Egbert de. 1985. *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa*. Pengantar: Sayogyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yacoub, Yarlina. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal EKSOS ISSN 1693-9093 Vol. 8. (<http://riset.polnep.ac.id>). Diakses pada 09 Mei 2018.
- Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yustika, Ahmad Erani. 2002. *Pembangunan & Krisis: Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Zuhdiyaty, Noor & David Kaluge. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir: Studi Kasus pada 33 Provinsi*. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Stie Asia Vol. 11 No. 2. (<http://lp3m.asia.ac.id>). Diakses pada 01 April 2018.

## LAMPIRAN

Lampiran 1: **Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Pulau Jawa Tahun 2011-2017**

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Kepulauan Seribu	11,53	11,62	11,01	11,56	11,40	12,58	12,98
Kota Jakarta Selatan	3,43	3,49	3,47	3,72	3,41	3,27	3,38
Kota Jakarta Timur	3,06	3,12	3,10	3,43	3,24	3,19	3,31
Kota Jakarta Pusat	3,56	3,72	3,70	4,12	4,16	3,91	3,78
Kota Jakarta Barat	3,44	3,47	3,46	3,72	3,64	3,38	3,25
Kota Jakarta Utara	5,07	5,14	5,30	6,00	5,91	5,57	5,59
Kab. Bogor	9,65	8,83	9,54	8,91	8,96	8,83	8,57
Kab. Sukabumi	10,28	9,79	9,24	8,81	8,96	8,13	8,04
Kab. Cianjur	13,82	13,18	12,02	11,47	12,21	11,62	11,41
Kab. Bandung	8,99	8,33	7,94	7,65	8,00	7,61	7,36
Kab. Garut	13,47	12,72	12,79	12,47	12,81	11,64	11,27
Kab. Tasikmalaya	12,36	11,76	11,57	11,26	11,99	11,24	10,84
Kab. Ciamis	9,98	9,63	8,62	8,38	8,98	8,42	8,20
Kab. Kuningan	14,20	13,70	13,34	12,72	13,97	13,59	13,27
Kab. Cirebon	15,56	14,96	14,65	14,22	14,77	13,49	12,97
Kab. Majalengka	14,98	14,46	14,07	13,42	14,19	12,85	12,60
Kab. Sumedang	12,48	11,87	11,31	10,78	11,36	10,57	10,53
Kab. Indramayu	16,01	15,44	14,99	14,29	14,98	13,95	13,67
Kab. Subang	13,06	12,49	12,35	11,73	12,27	11,05	10,77
Kab. Purwakarta	10,22	9,57	9,28	8,80	9,14	8,98	9,06
Kab. Karawang	11,80	11,11	10,69	10,15	10,37	10,07	10,25
Kab. Bekasi	5,93	5,25	5,20	4,97	5,27	4,92	4,73
Kab. Bandung Barat	14,22	13,35	12,92	12,26	12,67	11,71	11,49
Kota Bogor	9,16	8,48	8,19	7,74	7,60	7,29	7,11
Kota Sukabumi	8,95	8,42	8,05	7,65	8,79	8,59	8,48
Kota Bandung	4,78	4,55	4,78	4,65	4,61	4,32	4,17
Kota Cirebon	11,56	11,1	10,54	10,03	10,36	9,73	9,66
Kota Bekasi	6,12	5,56	5,33	5,25	5,46	5,06	4,79
Kota Depok	2,75	2,46	2,32	2,32	2,40	2,34	2,34
Kota Cimahi	7,15	6,68	5,63	5,47	5,84	5,92	5,76
Kota Tasikmalaya	19,98	18,94	17,19	15,95	16,28	15,60	14,80
Kota Banjar	8,21	7,79	7,11	6,95	7,41	7,01	7,06
Kab. Cilacap	17,15	15,92	15,24	14,21	14,39	14,12	13,94
Kab. Banyumas	21,11	19,44	18,44	17,45	17,52	17,23	17,05
Kab. Purbalingga	23,06	21,19	20,53	19,75	19,70	18,98	18,80
Kab. Banjarnegara	20,38	18,87	18,71	17,77	18,37	17,46	17,21
Kab. Kebumen	24,06	22,40	21,32	20,50	20,44	19,86	19,60
Kab. Purworejo	17,51	16,32	15,44	14,41	14,27	13,91	13,81



Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Wonosobo	24,21	22,50	22,08	21,42	21,25	20,53	20,32
Kab. Magelang	15,18	13,97	13,96	12,98	13,07	12,67	12,42
Kab. Boyolali	14,97	13,88	13,27	12,36	12,45	12,09	11,96
Kab. Klaten	17,95	16,71	15,60	14,56	14,89	14,46	14,15
Kab. Sukoharjo	11,13	10,15	9,87	9,18	9,26	9,07	8,75
Kab. Wonogiri	15,74	14,67	14,02	13,09	12,98	13,12	12,90
Kab. Karanganyar	15,29	14,07	13,58	12,62	12,46	12,49	12,28
Kab. Sragen	17,95	16,72	15,93	14,87	14,86	14,38	14,02
Kab. Grobogan	17,38	16,13	14,87	13,86	13,68	13,57	13,27
Kab. Blora	16,24	15,10	14,64	13,66	13,52	13,33	13,04
Kab. Rembang	23,71	21,88	20,97	19,50	19,28	18,54	18,35
Kab. Pati	14,69	13,61	12,94	12,06	11,95	11,65	11,38
Kab. Kudus	9,45	8,63	8,62	7,99	7,73	7,65	7,59
Kab. Jepara	10,32	9,38	9,23	8,55	8,50	8,35	8,12
Kab. Demak	18,21	16,73	15,72	14,60	14,44	14,10	13,41
Kab. Semarang	10,30	9,40	8,51	8,05	8,15	7,99	7,78
Kab. Temanggung	13,38	12,32	12,42	11,55	11,76	11,60	11,46
Kab. Kendal	14,26	13,17	12,68	11,80	11,62	11,37	11,10
Kab. Batang	13,47	12,40	11,96	11,13	11,27	11,04	10,80
Kab. Pekalongan	15,00	13,85	13,51	12,57	12,84	12,90	12,61
Kab. Pemalang	20,68	19,27	19,27	18,44	18,30	17,58	17,37
Kab. Tegal	11,54	10,75	10,58	9,87	10,09	10,10	9,90
Kab. Brebes	22,72	21,12	20,82	20,00	19,79	19,47	19,14
Kota Magelang	11,06	10,31	9,80	9,14	9,05	8,79	8,75
Kota Surakarta	12,90	12,00	11,74	10,95	10,89	10,88	10,65
Kota Salatiga	7,80	7,11	6,40	5,93	5,80	5,24	5,07
Kota Semarang	5,68	5,13	5,25	5,04	4,97	4,85	4,62
Kota Pekalongan	10,04	9,47	8,26	8,02	8,09	7,92	7,47
Kota Tegal	10,81	10,04	8,84	8,54	8,26	8,20	8,11
Kab. Kulon Progo	23,62	23,32	21,39	20,64	21,40	20,3	20,03
Kab. Bantul	17,28	16,97	16,48	15,89	16,33	14,55	14,07
Kab. Gunung Kidul	23,03	22,72	21,70	20,83	21,73	19,34	18,65
Kab. Sleman	10,61	10,44	9,68	9,50	9,46	8,21	8,13
Kota Yogyakarta	9,62	9,38	8,82	8,67	8,75	7,70	7,64
Kab. Pacitan	18,13	17,29	16,73	16,18	16,68	15,49	15,42
Kab. Ponorogo	12,29	11,76	11,92	11,53	11,91	11,75	11,39
Kab. Trenggalek	14,90	14,21	13,56	13,10	13,39	13,24	12,96
Kab. Tulungagung	9,90	9,40	9,07	8,75	8,57	8,23	8,04
Kab. Blitar	11,29	10,74	10,57	10,22	9,97	9,88	9,80
Kab. Kediri	14,44	13,71	13,23	12,77	12,91	12,72	12,25
Kab. Malang	11,67	11,04	11,48	11,07	11,53	11,49	11,04
Kab. Lumajang	13,01	12,40	12,14	11,75	11,52	11,22	10,87
Kab. Jember	12,44	11,81	11,68	11,28	11,22	10,97	11,00

Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Banyuwangi	10,47	9,97	9,61	9,29	9,17	8,79	8,64
Kab. Bondowoso	16,66	15,81	15,29	14,76	14,96	15,00	14,54
Kab. Situbondo	15,11	14,34	13,65	13,15	13,63	13,34	13,05
Kab. Probolinggo	23,48	22,22	21,21	20,44	20,82	20,98	20,52
Kab. Pasuruan	12,26	11,58	11,26	10,86	10,72	10,57	10,34
Kab. Sidoarjo	6,97	6,44	6,72	6,40	6,44	6,39	6,23
Kab. Mojokerto	11,38	10,71	10,99	10,56	10,57	10,61	10,19
Kab. Jombang	12,88	12,23	11,17	10,80	10,79	10,70	10,48
Kab. Nganjuk	13,88	13,22	13,60	13,14	12,69	12,25	11,98
Kab. Madiun	14,37	13,70	12,45	12,04	12,54	12,69	12,28
Kab. Magetan	12,01	11,50	12,19	11,80	11,35	11,03	10,48
Kab. Ngawi	16,74	15,99	15,45	14,88	15,61	15,27	14,91
Kab. Bojonegoro	17,47	16,66	16,02	15,48	15,71	14,60	14,34
Kab. Tuban	18,78	17,84	17,23	16,64	17,08	17,14	16,87
Kab Lamongan	17,41	16,70	16,18	15,68	15,38	14,89	14,42
Kab. Gresik	15,33	14,35	13,94	13,41	13,63	13,19	12,80
Kab. Bangkalan	26,22	24,70	23,23	22,38	22,57	21,41	21,32
Kab. Sampang	30,21	27,97	27,08	25,80	25,69	24,11	23,56
Kab. Pamekasan	20,94	19,61	18,53	17,74	17,41	16,70	16,00
Kab. Sumenep	23,10	21,96	21,22	20,49	20,20	20,09	19,62
Kota Kediri	8,63	8,14	8,23	7,95	8,51	8,40	8,49
Kota Blitar	7,12	6,75	7,42	7,15	7,29	7,18	8,03
Kota Malang	5,50	5,21	4,87	4,80	4,60	4,33	4,17
Kota Probolinggo	17,74	10,92	8,55	8,37	8,17	7,97	7,84
Kota Pasuruan	8,39	7,90	7,60	7,34	7,47	7,62	7,53
Kota Mojokerto	6,89	6,48	6,65	6,42	6,16	5,73	5,73
Kota Madiun	5,66	5,37	5,02	4,86	4,89	5,16	4,94
Kota Surabaya	6,58	6,25	6,00	5,79	5,82	5,63	5,39
Kota Batu	4,74	4,47	4,77	4,59	4,71	4,48	4,31
Kab. Pandeglang	9,80	9,28	10,25	9,50	10,43	9,67	9,74
Kab. Lebak	9,20	8,63	9,50	9,17	9,97	8,71	8,64
Kab. Tangerang	6,42	5,71	5,78	5,26	5,71	5,29	5,39
Kab. Serang	5,63	5,28	5,02	4,87	5,09	4,58	4,63
Kota Tangerang	6,14	5,56	5,26	4,91	5,04	4,94	4,95
Kota Cilegon	3,98	3,82	3,99	3,81	4,10	3,57	3,52
Kota Serang	6,25	5,70	5,92	5,70	6,28	5,58	5,57
Kota Tangerang Selatan	1,50	1,33	1,75	1,68	1,69	1,67	1,76

Sumber: \*) Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah);

\*\*) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018 (data diolah);

\*\*\*) Dan berbagai sumber lain, 2018 (data diolah).



## Lampiran 2: Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Pulau Jawa Tahun 2017

Kab/Kota	Tahun	Tingkat Kemiskinan	Rangking
Kabupaten Kepulauan Seribu	2017	12,98	34
Kota Jakarta Selatan	2017	3,38	114
Kota Jakarta Timur	2017	3,31	115
Kota Jakarta Pusat	2017	3,78	112
Kota Jakarta Barat	2017	3,25	116
Kota Jakarta Utara	2017	5,59	98
Kabupaten Bogor	2017	8,57	76
Kabupaten Sukabumi	2017	8,04	83
Kabupaten Cianjur	2017	11,41	49
Kabupaten Bandung	2017	7,36	92
Kabupaten Garut	2017	11,27	52
Kabupaten Tasikmalaya	2017	10,84	57
Kabupaten Ciamis	2017	8,20	79
Kabupaten Kuningan	2017	13,27	30
Kabupaten Cirebon	2017	12,97	35
Kabupaten Majalengka	2017	12,60	40
Kabupaten Sumedang	2017	10,53	61
Kabupaten Indramayu	2017	13,67	28
Kabupaten Subang	2017	10,77	59
Kabupaten Purwakarta	2017	9,06	71
Kabupaten Karawang	2017	10,25	65
Kabupaten Bekasi	2017	4,73	106
Kabupaten Bandung Barat	2017	11,49	47
Kota Bogor	2017	7,11	93
Kota Sukabumi	2017	8,48	78
Kota Bandung	2017	4,17	110
Kota Cirebon	2017	9,66	70
Kota Bekasi	2017	4,79	105
Kota Depok	2017	2,34	117
Kota Cimahi	2017	5,76	96
Kota Tasikmalaya	2017	14,80	19
Kota Banjar	2017	7,06	94
Kabupaten Cilacap	2017	13,94	26
Kabupaten Banyumas	2017	17,05	14
Kabupaten Purbalingga	2017	18,80	<b>9</b>
Kabupaten Banjarnegara	2017	17,21	13
Kabupaten Kebumen	2017	19,60	<b>7</b>
Kabupaten Purworejo	2017	13,81	27
Kabupaten Wonosobo	2017	20,32	<b>4</b>

Kab/Kota	Tahun	Tingkat Kemiskinan	Rangking
Kabupaten Magelang	2017	12,42	41
Kabupaten Boyolali	2017	11,96	46
Kabupaten Klaten	2017	14,15	23
Kabupaten Sukoharjo	2017	8,75	72
Kabupaten Wonogiri	2017	12,90	37
Kabupaten Karanganyar	2017	12,28	42
Kabupaten Sragen	2017	14,02	25
Kabupaten Grobogan	2017	13,27	30
Kabupaten Blora	2017	13,04	33
Kabupaten Rembang	2017	18,35	11
Kabupaten Pati	2017	11,38	51
Kabupaten Kudus	2017	7,59	89
Kabupaten Jepara	2017	8,12	81
Kabupaten Demak	2017	13,41	29
Kabupaten Semarang	2017	7,78	87
Kabupaten Temanggung	2017	11,46	48
Kabupaten Kendal	2017	11,10	53
Kabupaten Batang	2017	10,80	58
Kabupaten Pekalongan	2017	12,61	39
Kabupaten Pemalang	2017	17,37	12
Kabupaten Tegal	2017	9,90	67
Kabupaten Brebes	2017	19,14	<b>8</b>
Kota Magelang	2017	8,75	72
Kota Surakarta	2017	10,65	60
Kota Salatiga	2017	5,07	102
Kota Semarang	2017	4,62	108
Kota Pekalongan	2017	7,47	91
Kota Tegal	2017	8,11	82
Kabupaten Kulon Progo	2017	20,03	<b>5</b>
Kabupaten Bantul	2017	14,07	24
Kabupaten Gunung Kidul	2017	18,65	<b>10</b>
Kabupaten Sleman	2017	8,13	80
Kota Yogyakarta	2017	7,64	88
Kabupaten Pacitan	2017	15,42	17
Kabupaten Ponorogo	2017	11,39	50
Kabupaten Trenggalek	2017	12,96	36
Kabupaten Tulungagung	2017	8,04	83
Kabupaten Blitar	2017	9,80	68
Kabupaten Kediri	2017	12,25	44
Kabupaten Malang	2017	11,04	54

Kab/Kota	Tahun	Tingkat Kemiskinan	Rangking
Kabupaten Lumajang	2017	10,87	56
Kabupaten Jember	2017	11,00	55
Kabupaten Banyuwangi	2017	8,64	74
Kabupaten Bondowoso	2017	14,54	20
Kabupaten Situbondo	2017	13,05	32
Kabupaten Probolinggo	2017	20,52	<b>3</b>
Kabupaten Pasuruan	2017	10,34	64
Kabupaten Sidoarjo	2017	6,23	95
Kabupaten Mojokerto	2017	10,19	66
Kabupaten Jombang	2017	10,48	62
Kabupaten Nganjuk	2017	11,98	45
Kabupaten Madiun	2017	12,28	42
Kabupaten Magetan	2017	10,48	62
Kabupaten Ngawi	2017	14,91	18
Kabupaten Bojonegoro	2017	14,34	22
Kabupaten Tuban	2017	16,87	15
Kabupaten Lamongan	2017	14,42	21
Kabupaten Gresik	2017	12,80	38
Kabupaten Bangkalan	2017	21,32	<b>2</b>
Kabupaten Sampang	2017	23,56	<b>1</b>
Kabupaten Pamekasan	2017	16,00	16
Kabupaten Sumenep	2017	19,62	<b>6</b>
Kota Kediri	2017	8,49	77
Kota Blitar	2017	8,03	85
Kota Malang	2017	4,17	110
Kota Probolinggo	2017	7,84	86
Kota Pasuruan	2017	7,53	90
Kota Mojokerto	2017	5,73	97
Kota Madiun	2017	4,94	104
Kota Surabaya	2017	5,39	100
Kota Batu	2017	4,31	109
Kabupaten Pandeglang	2017	9,74	69
Kabupaten Lebak	2017	8,64	74
Kabupaten Tangerang	2017	5,39	100
Kabupaten Serang	2017	4,63	107
Kota Tangerang	2017	4,95	103
Kota Cilegon	2017	3,52	113
Kota Serang	2017	5,57	99
Kota Tangerang Selatan	2017	1,76	<b>118</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

### Lampiran 3: Hasil *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FE

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	432.202203	(117,705)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/15/18 Time: 22:56

Sample: 2011 2017

Periods included: 7

Cross-sections included: 118

Total panel (balanced) observations: 826

Use pre-specified GLS weights

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.119864	0.084231	-1.423047	0.1551
IPM	-0.401397	0.018337	-21.88987	0.0000
TPT	-0.307541	0.033254	-9.248271	0.0000
C	40.74507	1.279085	31.85485	0.0000

#### Weighted Statistics

R-squared	0.445117	Mean dependent var	17.05096
Adjusted R-squared	0.443091	S.D. dependent var	10.04879
S.E. of regression	5.076740	Sum squared resid	21185.64
F-statistic	219.7974	Durbin-Watson stat	0.055075
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### Unweighted Statistics

R-squared	0.426971	Mean dependent var	11.53073
Sum squared resid	12515.43	Durbin-Watson stat	0.043285

Sumber: Data olahan menggunakan Eviews *Student Version* 10, 2018.

#### Lampiran 4: Hasil *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: RE

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	59.429102	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PE	-0.040554	-0.044462	0.000003	0.0167
IPM	-0.524937	-0.540240	0.000054	0.0369
TPT	0.012189	-0.012685	0.000021	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TK

Method: Panel Least Squares

Date: 09/15/18 Time: 22:59

Sample: 2011 2017

Periods included: 7

Cross-sections included: 118

Total panel (balanced) observations: 826

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.22203	1.441061	33.46286	0.0000
PE	-0.040554	0.019381	-2.092503	0.0368
IPM	-0.524937	0.019701	-26.64574	0.0000
TPT	0.012189	0.019501	0.625020	0.5322

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986394	Mean dependent var	11.53073
Adjusted R-squared	0.984078	S.D. dependent var	5.145264
S.E. of regression	0.649234	Akaike info criterion	2.108536
Sum squared resid	297.1613	Schwarz criterion	2.799465
Log likelihood	-749.8252	Hannan-Quinn criter.	2.373558
F-statistic	425.9272	Durbin-Watson stat	0.881134
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data olahan menggunakan Eviews *Student Version* 10, 2018.

Lampiran 5: Hasil Estimasi *Fixed Effect Model (Cross-section Weights)*

Dependent Variable: TK

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 09/15/18 Time: 22:52

Sample: 2011 2017

Periods included: 7

Cross-sections included: 118

Total panel (balanced) observations: 826

Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-0.021854	0.014066	-1.553734	0.1207
IPM	-0.483269	0.011326	-42.66721	0.0000
TPT	0.035335	0.011312	3.123535	0.0019
C	45.07218	0.841518	53.56056	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.992370	Mean dependent var	17.05096
Adjusted R-squared	0.991072	S.D. dependent var	10.04879
S.E. of regression	0.642803	Sum squared resid	291.3030
F-statistic	764.1464	Durbin-Watson stat	1.237254
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.986294	Mean dependent var	11.53073
Sum squared resid	299.3484	Durbin-Watson stat	0.858071

Sumber: Data olahan menggunakan Eviews *Student Version* 10, 2018.



Lampiran 6: **Distribusi dan Pertumbuhan Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Pulau Jawa Tahun 2015-2017**

Lapangan Usaha	Distribusi Sektoral			Pertumbuhan Sektoral		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				3,23	3,24	1,86
Pertambangan dan Penggalan	1,50	1,56	1,58	2,67	5,76	2,25
Industri Pengolahan				4,25	4,20	5,37
Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,65	0,60	-0,50	3,04	2,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang				4,04	4,18	5,63
Konstruksi				5,37	4,95	6,93
Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				4,51	5,07	5,73
Transportasi dan Pergudangan	5,19	5,35	5,42	7,24	7,37	6,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,78	4,84	4,87	6,71	7,19	7,20
Informasi dan Komunikasi	4,82	4,88	5,03			
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,21	4,32	4,29	8,26	9,27	3,88
Real Estate	4,12	4,12	4,15	6,00	6,03	6,14
Jasa Perusahaan	1,79	1,82	1,88	7,49	7,21	7,44
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,93	3,91	3,85	4,90	4,35	2,00
Jasa Pendidikan	4,45	4,47	4,47	7,46	6,32	6,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,26	1,27	7,85	7,47	7,20
Jasa Lainnya	2,06	2,11	2,17	6,61	7,28	7,68
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5,41</b>	<b>5,45</b>	<b>5,53</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah).

## Lampiran 7: Data Variabel Penelitian

Kab/Kota	Tahun	TK	PE	IPM	TPT
Kab. Kepulauan Seribu	2011	11,53	4,28	65,79	11,38
	2012	11,62	0,41	66,92	13,97
	2013	11,01	0,79	67,62	6,03
	2014	11,56	0,36	68,48	5,43
	2015	11,40	0,30	68,84	5,51
	2016	12,58	0,54	69,52	6,42
	2017	12,98	1,22	70,11	7,33
Kota Jakarta Selatan	2011	3,43	6,97	81,22	10,36
	2012	3,49	6,69	81,72	8,96
	2013	3,47	6,26	82,72	8,56
	2014	3,72	6,03	82,94	7,56
	2015	3,41	6,11	83,37	6,36
	2016	3,27	6,10	83,94	6,61
	2017	3,38	6,32	84,13	6,86
Kota Jakarta Timur	2011	3,06	6,28	78,82	10,95
	2012	3,12	6,13	79,52	10,39
	2013	3,10	5,89	79,88	9,47
	2014	3,43	6,14	80,40	8,72
	2015	3,24	5,41	80,73	9,13
	2016	3,19	5,97	81,28	8,47
	2017	3,31	6,36	81,61	7,80
Kota Jakarta Pusat	2011	3,56	7,19	77,97	11,21
	2012	3,72	7,06	78,44	10,72
	2013	3,70	6,08	78,81	8,60
	2014	4,12	5,83	79,03	7,81
	2015	4,16	6,62	79,69	6,51
	2016	3,91	6,49	80,22	6,67
	2017	3,78	6,02	80,40	6,82
Kota Jakarta Barat	2011	3,44	6,92	77,41	10,72
	2012	3,47	6,94	78,05	9,31
	2013	3,46	6,66	78,79	8,69
	2014	3,72	5,96	79,38	9,00
	2015	3,64	5,99	79,72	6,31
	2016	3,38	6,01	80,34	6,36
	2017	3,25	6,41	80,47	6,40
Kota Jakarta Utara	2011	5,07	6,36	76,12	10,98
	2012	5,14	6,03	76,89	10,33
	2013	5,30	5,82	77,16	9,67
	2014	6,00	5,79	77,29	8,88

	2015	5,91	5,61	78,30	7,11
	2016	5,57	4,65	78,78	7,39
	2017	5,59	6,36	79,47	7,67
Kab. Bogor	2011	9,65	5,86	64,78	10,73
	2012	8,83	6,01	65,66	9,07
	2013	9,54	6,14	66,74	8,62
	2014	8,91	6,01	67,36	7,65
	2015	8,96	6,09	67,77	10,01
	2016	8,83	6,35	68,32	9,62
	2017	8,57	5,96	69,13	9,55
Kab. Sukabumi	2011	10,28	4,42	61,14	9,47
	2012	9,79	6,38	62,27	9,74
	2013	9,24	5,51	63,63	10,38
	2014	8,81	5,98	64,07	8,09
	2015	8,96	4,91	64,44	10,05
	2016	8,13	5,56	65,13	8,86
	2017	8,04	5,14	65,49	7,66
Kab. Cianjur	2011	13,82	4,89	59,38	10,15
	2012	13,18	5,60	60,28	11,26
	2013	12,02	4,89	61,68	14,33
	2014	11,47	5,06	62,08	14,87
	2015	12,21	5,46	62,42	10,06
	2016	11,62	6,39	62,92	10,08
	2017	11,41	5,72	63,70	10,10
Kab. Bandung	2011	8,99	5,82	67,78	6,44
	2012	8,33	6,28	68,13	9,80
	2013	7,94	5,92	68,58	10,50
	2014	7,65	5,91	69,06	8,48
	2015	8,00	5,89	70,05	4,03
	2016	7,61	6,33	70,69	3,98
	2017	7,36	6,17	71,02	3,92
Kab. Garut	2011	13,47	4,95	60,55	9,87
	2012	12,72	4,07	61,04	6,22
	2013	12,79	4,76	61,67	8,14
	2014	12,47	4,81	62,23	7,71
	2015	12,81	4,51	63,21	6,50
	2016	11,64	5,85	63,64	7,18
	2017	11,27	4,89	64,52	7,86
Kab. Tasikmalaya	2011	12,36	4,25	61,05	8,29
	2012	11,76	4,02	61,69	7,00
	2013	11,57	4,65	62,40	6,46
	2014	11,26	4,78	62,79	5,38

	2015	11,99	4,31	63,17	8,51
	2016	11,24	5,91	63,57	7,56
	2017	10,84	5,95	64,14	6,61
Kab. Ciamis	2011	9,98	5,23	65,48	8,44
	2012	9,63	5,41	66,29	5,28
	2013	8,62	5,34	67,20	5,20
	2014	8,38	5,07	67,64	5,61
	2015	8,98	5,58	68,02	6,99
	2016	8,42	6,59	68,45	6,08
	2017	8,20	5,21	68,87	5,17
Kab. Kuningan	2011	14,20	5,62	65,04	4,61
	2012	13,70	5,71	65,60	4,13
	2013	13,34	6,25	66,16	5,52
	2014	12,72	6,32	66,63	5,13
	2015	13,97	6,38	67,19	7,49
	2016	13,59	6,09	67,51	7,72
	2017	13,27	6,36	67,78	7,94
Kab. Cirebon	2011	15,56	5,23	64,17	7,39
	2012	14,96	5,46	64,48	11,14
	2013	14,65	4,96	65,06	14,88
	2014	14,22	5,07	65,53	13,32
	2015	14,77	4,87	66,07	10,51
	2016	13,49	5,62	66,70	10,06
	2017	12,97	5,05	67,39	9,61
Kab. Majalengka	2011	14,98	4,71	62,67	7,80
	2012	14,46	6,06	63,13	6,71
	2013	14,07	4,93	63,71	7,35
	2014	13,42	4,91	64,07	4,47
	2015	14,19	5,33	64,75	4,01
	2016	12,85	5,90	65,25	4,52
	2017	12,60	6,81	65,92	5,02
Kab. Sumedang	2011	12,48	4,79	66,16	8,04
	2012	11,87	6,56	67,36	7,48
	2013	11,31	4,84	68,47	7,50
	2014	10,78	4,70	68,76	7,51
	2015	11,36	5,23	69,29	9,00
	2016	10,57	5,70	69,45	8,07
	2017	10,53	6,23	70,07	7,15
Kab. Indramayu	2011	16,01	4,06	61,47	11,20
	2012	15,44	3,18	62,09	7,60
	2013	14,99	2,86	62,98	9,63
	2014	14,29	4,93	63,55	8,01

	2015	14,98	2,16	64,36	8,51
	2016	13,95	0,08	64,78	8,58
	2017	13,67	1,45	65,58	8,64
Kab. Subang	2011	13,06	3,27	64,21	9,10
	2012	12,49	0,60	64,86	8,01
	2013	12,35	4,09	65,48	7,42
	2014	11,73	5,02	65,80	6,74
	2015	12,27	5,29	66,52	10,04
	2016	11,05	5,40	67,14	9,39
	2017	10,77	5,10	67,73	8,74
Kab. Purwakarta	2011	10,22	6,70	65,51	9,48
	2012	9,57	6,83	66,30	9,26
	2013	9,28	7,15	67,09	7,83
	2014	8,80	5,72	67,32	7,83
	2015	9,14	4,75	67,84	10,00
	2016	8,98	5,87	68,56	9,56
	2017	9,06	5,12	69,28	9,11
Kab. Karawang	2011	11,80	6,56	65,21	10,06
	2012	11,11	4,94	65,97	7,40
	2013	10,69	7,96	66,61	9,86
	2014	10,15	5,37	67,08	11,10
	2015	10,37	4,49	67,66	11,51
	2016	10,07	6,31	68,19	10,53
	2017	10,25	5,76	69,17	9,55
Kab. Bekasi	2011	5,93	6,60	68,66	7,54
	2012	5,25	6,53	69,38	10,27
	2013	5,20	6,23	70,09	7,17
	2014	4,97	5,88	70,51	6,79
	2015	5,27	4,46	71,19	10,03
	2016	4,92	4,86	71,83	10,50
	2017	4,73	5,78	72,63	10,97
Kab. Bandung Barat	2011	14,22	5,68	62,36	13,01
	2012	13,35	6,04	63,17	12,37
	2013	12,92	5,94	63,93	9,61
	2014	12,26	5,77	64,27	9,89
	2015	12,67	5,01	65,23	10,01
	2016	11,71	5,64	65,81	9,67
	2017	11,49	5,21	66,63	9,33
Kota Bogor	2011	9,16	6,22	71,72	16,79
	2012	8,48	6,31	72,25	9,50
	2013	8,19	6,04	72,86	9,80
	2014	7,74	6,01	73,10	9,48

	2015	7,60	6,13	73,65	11,08
	2016	7,29	6,73	74,50	10,33
	2017	7,11	6,12	75,16	9,57
Kota Sukabumi	2011	8,95	6,18	68,67	10,10
	2012	8,42	5,80	69,74	11,63
	2013	8,05	5,41	70,81	11,24
	2014	7,65	5,43	71,19	11,84
	2015	8,79	5,10	71,84	9,06
	2016	8,59	5,66	72,33	8,53
	2017	8,48	5,43	73,03	8,00
Kota Bandung	2011	4,78	7,91	78,13	10,34
	2012	4,55	8,53	78,30	9,17
	2013	4,78	7,84	78,55	10,98
	2014	4,65	7,71	78,98	8,05
	2015	4,61	7,63	79,67	9,02
	2016	4,32	7,79	80,13	8,73
	2017	4,17	7,21	80,31	8,44
Kota Cirebon	2011	11,56	5,78	71,49	10,56
	2012	11,10	5,92	71,97	12,50
	2013	10,54	4,90	72,27	11,76
	2014	10,03	5,71	72,93	11,02
	2015	10,36	5,80	73,34	11,28
	2016	9,73	5,95	73,70	10,29
	2017	9,66	5,79	74,00	9,29
Kota Bekasi	2011	6,12	6,45	77,48	10,51
	2012	5,56	6,74	77,71	8,75
	2013	5,33	6,04	78,63	9,59
	2014	5,25	5,61	78,84	9,36
	2015	5,46	5,57	79,63	9,36
	2016	5,06	6,08	79,95	9,34
	2017	4,79	5,73	80,30	9,32
Kota Depok	2011	2,75	6,81	76,96	10,6
	2012	2,46	8,06	77,28	9,42
	2013	2,32	6,85	78,27	7,67
	2014	2,32	7,28	78,58	8,44
	2015	2,40	6,63	79,11	7,48
	2016	2,34	7,28	79,60	7,24
	2017	2,34	6,65	79,83	7,00
Kota Cimahi	2011	7,15	5,50	74,41	10,32
	2012	6,68	6,24	74,99	8,57
	2013	5,63	5,65	75,85	11,43
	2014	5,47	5,49	76,06	9,62



	2015	5,84	5,43	76,42	9,00
	2016	5,92	5,62	76,69	8,72
	2017	5,76	5,36	76,95	8,43
Kota Tasikmalaya	2011	19,98	5,02	67,18	9,14
	2012	18,94	5,80	67,84	7,03
	2013	17,19	6,17	68,63	6,52
	2014	15,95	6,16	69,04	5,38
	2015	16,28	6,29	69,99	5,46
	2016	15,60	6,91	70,58	6,18
	2017	14,80	6,07	71,51	6,89
Kota Banjar	2011	8,21	5,47	67,15	7,18
	2012	7,79	5,32	67,53	6,20
	2013	7,11	5,45	68,01	6,79
	2014	6,95	4,97	68,34	7,37
	2015	7,41	5,32	69,31	7,38
	2016	7,01	5,86	70,09	6,68
	2017	7,06	5,12	70,79	5,97
Kab. Cilacap	2011	17,15	4,07	64,73	10,82
	2012	15,92	1,98	65,72	7,29
	2013	15,24	1,66	66,80	6,68
	2014	14,21	2,92	67,25	5,65
	2015	14,39	5,96	67,77	8,01
	2016	14,12	5,06	68,60	7,15
	2017	13,94	2,45	68,90	6,30
Kab. Banyumas	2011	21,11	6,61	67,45	6,61
	2012	19,44	5,88	68,06	5,11
	2013	18,44	6,97	68,55	5,45
	2014	17,45	5,67	69,25	5,37
	2015	17,52	6,12	69,89	6,37
	2016	17,23	6,05	70,49	5,50
	2017	17,05	6,34	70,75	4,62
Kab. Purbalingga	2011	23,06	5,67	64,33	5,10
	2012	21,19	5,79	64,94	5,02
	2013	20,53	5,27	65,53	5,63
	2014	19,75	4,85	66,23	5,13
	2015	19,70	5,47	67,03	4,84
	2016	18,98	4,78	67,48	5,09
	2017	18,80	5,12	67,72	5,33
Kab. Banjarnegara	2011	20,38	5,44	61,58	4,97
	2012	18,87	5,23	62,29	3,69
	2013	18,71	5,44	62,84	4,16
	2014	17,77	5,31	63,15	4,06

	2015	18,37	5,47	64,73	5,05
	2016	17,46	5,41	65,52	4,89
	2017	17,21	5,42	65,86	4,72
Kab. Kebumen	2011	24,06	6,15	64,05	4,73
	2012	22,40	4,88	64,47	3,58
	2013	21,32	4,57	64,86	3,52
	2014	20,50	5,79	65,67	3,25
	2015	20,44	6,28	66,87	4,14
	2016	19,86	4,97	67,41	4,86
	2017	19,60	4,89	68,29	5,58
Kab. Purworejo	2011	17,51	5,64	69,11	5,30
	2012	16,32	4,59	69,40	3,20
	2013	15,44	4,94	69,77	5,15
	2014	14,41	4,48	70,12	5,10
	2015	14,27	5,33	70,37	4,01
	2016	13,91	5,12	70,66	3,83
	2017	13,81	5,14	71,31	3,64
Kab. Wonosobo	2011	24,21	5,37	63,07	4,92
	2012	22,50	4,70	64,18	5,21
	2013	22,08	4,00	64,57	5,82
	2014	21,42	4,78	65,20	5,34
	2015	21,25	4,67	65,70	4,47
	2016	20,53	5,13	66,19	4,32
	2017	20,32	3,16	66,89	4,18
Kab. Magelang	2011	15,18	6,68	64,16	6,83
	2012	13,97	4,88	64,75	4,38
	2013	13,96	5,91	65,86	6,13
	2014	12,98	5,38	66,35	7,45
	2015	13,07	5,18	67,13	5,16
	2016	12,67	5,37	67,85	3,80
	2017	12,42	5,06	68,39	2,44
Kab. Boyolali	2011	14,97	6,34	69,14	5,81
	2012	13,88	5,33	69,51	4,43
	2013	13,27	5,83	69,81	5,44
	2014	12,36	5,42	70,34	4,95
	2015	12,45	5,96	71,74	2,03
	2016	12,09	5,30	72,18	2,85
	2017	11,96	5,52	72,64	3,67
Kab. Klaten	2011	17,95	6,29	71,16	7,63
	2012	16,71	5,71	71,71	3,70
	2013	15,60	5,96	72,42	5,34
	2014	14,56	5,84	73,19	4,75

	2015	14,89	5,30	73,81	2,51
	2016	14,46	5,14	73,97	3,43
	2017	14,15	5,07	74,25	4,35
Kab. Sukoharjo	2011	11,13	5,88	72,34	6,27
	2012	10,15	5,90	72,81	6,10
	2013	9,87	5,78	73,22	5,98
	2014	9,18	5,40	73,76	4,60
	2015	9,26	5,69	74,53	4,52
	2016	9,07	5,71	75,06	3,39
	2017	8,75	5,72	75,56	2,27
Kab. Wonogiri	2011	15,74	3,58	64,75	3,82
	2012	14,67	5,94	65,75	3,46
	2013	14,02	4,78	66,40	3,61
	2014	13,09	5,26	66,77	3,45
	2015	12,98	5,40	67,76	3,07
	2016	13,12	5,23	68,23	2,72
	2017	12,90	5,17	68,66	2,38
Kab. Karanganyar	2011	15,29	4,95	71,00	5,78
	2012	14,07	5,90	72,26	5,82
	2013	13,58	5,69	73,33	3,84
	2014	12,62	5,22	73,89	3,54
	2015	12,46	5,05	74,26	3,60
	2016	12,49	5,37	74,90	3,39
	2017	12,28	5,52	75,22	3,17
Kab. Sragen	2011	17,95	6,55	68,12	8,43
	2012	16,72	6,12	68,91	5,88
	2013	15,93	6,70	69,95	5,63
	2014	14,87	5,59	70,52	6,04
	2015	14,86	6,05	71,10	4,51
	2016	14,38	5,74	71,43	4,53
	2017	14,02	5,81	72,40	4,55
Kab. Grobogan	2011	17,38	3,19	65,41	5,33
	2012	16,13	5,08	66,39	4,20
	2013	14,87	4,57	67,43	6,10
	2014	13,86	4,07	67,77	4,25
	2015	13,68	5,96	68,05	5,22
	2016	13,57	4,46	68,52	4,12
	2017	13,27	5,65	68,87	3,02
Kab. Blora	2011	16,24	4,42	63,88	6,90
	2012	15,10	4,90	64,70	4,75
	2013	14,64	5,36	65,37	6,23
	2014	13,66	4,39	65,84	4,30

	2015	13,52	5,36	66,22	4,68
	2016	13,33	23,53	66,61	3,76
	2017	13,04	5,84	67,52	2,85
Kab. Rembang	2011	23,71	5,19	65,36	7,22
	2012	21,88	5,32	66,03	5,75
	2013	20,97	5,43	66,84	5,97
	2014	19,50	5,15	67,40	5,23
	2015	19,28	5,50	68,18	4,51
	2016	18,54	5,23	68,60	3,85
	2017	18,35	6,18	68,95	3,19
Kab. Pati	2011	14,69	5,91	65,71	11,17
	2012	13,61	5,93	66,13	11,98
	2013	12,94	5,97	66,47	7,29
	2014	12,06	4,64	66,99	6,37
	2015	11,95	6,01	68,51	4,43
	2016	11,65	5,46	69,03	4,13
	2017	11,38	5,40	70,12	3,83
Kab. Kudus	2011	9,45	4,24	69,89	8,32
	2012	8,63	4,11	70,57	5,89
	2013	8,62	4,36	71,58	8,07
	2014	7,99	4,43	72,00	5,03
	2015	7,73	3,88	72,72	5,04
	2016	7,65	2,52	72,94	4,30
	2017	7,59	2,97	73,84	3,56
Kab. Jepara	2011	10,32	4,92	67,63	5,48
	2012	9,38	5,86	68,45	4,29
	2013	9,23	5,39	69,11	6,34
	2014	8,55	4,81	69,61	5,09
	2015	8,50	5,10	70,02	3,12
	2016	8,35	5,02	70,25	3,98
	2017	8,12	5,13	70,79	4,84
Kab. Demak	2011	18,21	5,39	66,84	5,03
	2012	16,73	4,46	67,55	8,40
	2013	15,72	5,27	68,38	7,08
	2014	14,60	4,29	68,95	5,17
	2015	14,44	5,93	69,75	6,02
	2016	14,10	5,05	70,10	5,24
	2017	13,41	5,56	70,41	4,47
Kab. Semarang	2011	10,30	6,27	70,35	6,16
	2012	9,40	6,03	70,88	4,87
	2013	8,51	5,97	71,29	3,90
	2014	8,05	5,85	71,65	4,38

	2015	8,15	5,52	71,89	2,57
	2016	7,99	5,27	72,40	2,17
	2017	7,78	5,47	73,20	1,78
Kab. Temanggung	2011	13,38	6,09	64,14	3,54
	2012	12,32	4,27	64,91	3,39
	2013	12,42	5,20	65,52	4,87
	2014	11,55	5,03	65,97	3,19
	2015	11,76	5,24	67,07	1,50
	2016	11,60	4,98	67,60	2,24
	2017	11,46	4,68	68,34	2,97
Kab. Kendal	2011	14,26	6,57	66,96	6,54
	2012	13,17	5,21	67,55	6,31
	2013	12,68	6,22	67,98	6,43
	2014	11,80	5,14	68,46	6,15
	2015	11,62	5,21	69,57	7,07
	2016	11,37	5,53	70,11	6,00
	2017	11,10	5,57	70,62	4,93
Kab. Batang	2011	13,47	6,12	62,59	6,66
	2012	12,40	4,62	63,09	5,88
	2013	11,96	5,88	63,60	7,02
	2014	11,13	5,31	64,07	7,42
	2015	11,27	5,42	65,46	4,56
	2016	11,04	4,98	66,38	5,19
	2017	10,80	5,29	67,35	5,82
Kab. Pekalongan	2011	15,00	5,66	64,72	6,91
	2012	13,85	4,81	65,33	5,08
	2013	13,51	5,99	66,26	4,78
	2014	12,57	4,95	66,98	6,03
	2015	12,84	4,78	67,40	5,10
	2016	12,90	5,16	67,71	4,74
	2017	12,61	5,28	68,40	4,39
Kab. Pemasang	2011	20,68	5,01	59,66	7,37
	2012	19,27	5,32	60,78	4,85
	2013	19,27	5,57	61,81	6,48
	2014	18,44	5,52	62,35	7,44
	2015	18,30	5,58	63,70	6,53
	2016	17,58	5,38	64,17	6,06
	2017	17,37	5,39	65,04	5,59
Kab. Tegal	2011	11,54	6,39	61,97	10,59
	2012	10,75	5,23	62,67	6,12
	2013	10,58	6,73	63,50	6,89
	2014	9,87	5,03	64,10	8,47

	2015	10,09	5,49	65,04	9,52
	2016	10,10	5,92	65,84	8,43
	2017	9,90	5,38	66,44	7,33
Kab. Brebes	2011	22,72	6,65	60,51	11,08
	2012	21,12	4,58	60,92	8,22
	2013	20,82	5,91	61,87	9,61
	2014	20,00	5,30	62,55	9,53
	2015	19,79	5,98	63,18	6,49
	2016	19,47	5,08	63,98	7,27
	2017	19,14	5,47	64,86	8,04
Kota Magelang	2011	11,06	6,11	74,47	11,51
	2012	10,31	5,37	75,00	8,99
	2013	9,80	6,04	75,29	6,75
	2014	9,14	4,98	75,79	7,38
	2015	9,05	5,11	76,39	6,43
	2016	8,79	5,17	77,16	6,56
	2017	8,75	5,18	77,84	6,68
Kota Surakarta	2011	12,9	6,42	78,00	7,70
	2012	12,00	5,58	78,44	6,29
	2013	11,74	6,25	78,89	7,22
	2014	10,95	5,28	79,34	6,16
	2015	10,89	5,44	80,14	4,53
	2016	10,88	5,32	80,76	4,50
	2017	10,65	5,33	80,85	4,47
Kota Salatiga	2011	7,80	6,58	78,76	9,02
	2012	7,11	5,53	79,10	6,84
	2013	6,40	6,30	79,37	6,21
	2014	5,93	5,57	79,98	4,46
	2015	5,80	5,17	80,96	6,43
	2016	5,24	5,22	81,14	5,20
	2017	5,07	5,21	81,68	3,96
Kota Semarang	2011	5,68	6,58	77,58	7,65
	2012	5,13	5,97	78,04	6,01
	2013	5,25	6,25	78,68	6,02
	2014	5,04	6,31	79,24	7,76
	2015	4,97	5,82	80,23	5,77
	2016	4,85	5,84	81,19	6,19
	2017	4,62	5,64	82,01	6,61
Kota Pekalongan	2011	10,04	5,49	69,54	8,06
	2012	9,47	5,61	69,95	7,67
	2013	8,26	5,91	70,82	5,28
	2014	8,02	5,48	71,53	5,42



	2015	8,09	5,00	72,69	4,10
	2016	7,92	5,36	73,32	4,58
	2017	7,47	5,32	73,77	5,05
Kota Tegal	2011	10,81	6,47	70,03	9,77
	2012	10,04	4,21	70,68	8,75
	2013	8,84	5,67	71,44	9,32
	2014	8,54	5,04	72,20	9,20
	2015	8,26	5,45	72,96	8,06
	2016	8,20	5,44	73,55	8,13
	2017	8,11	5,46	73,95	8,19
Kab. Kulon Progo	2011	23,62	4,23	69,53	3,03
	2012	23,32	4,37	69,74	3,04
	2013	21,39	4,87	70,14	2,85
	2014	20,64	4,57	70,68	2,88
	2015	21,40	4,62	71,52	3,72
	2016	20,30	4,76	72,38	2,86
	2017	20,03	5,97	73,23	1,99
Kab. Bantul	2011	17,28	5,07	75,79	4,39
	2012	16,97	5,33	76,13	3,70
	2013	16,48	5,46	76,78	3,36
	2014	15,89	5,04	77,11	2,57
	2015	16,33	4,97	77,99	3,00
	2016	14,55	5,06	78,42	3,06
	2017	14,07	5,10	78,67	3,12
Kab. Gunung Kidul	2011	23,03	4,52	64,83	2,23
	2012	22,72	4,84	65,69	1,38
	2013	21,70	4,97	66,31	1,69
	2014	20,83	4,54	67,03	1,61
	2015	21,73	4,82	67,41	2,90
	2016	19,34	4,89	67,82	2,28
	2017	18,65	5,00	68,73	1,65
Kab. Sleman	2011	10,61	5,42	80,04	5,36
	2012	10,44	5,79	80,10	5,64
	2013	9,68	5,89	80,26	3,28
	2014	9,50	5,30	80,73	4,21
	2015	9,46	5,18	81,20	5,37
	2016	8,21	5,25	82,15	4,44
	2017	8,13	5,35	82,85	3,51
Kota Yogyakarta	2011	9,62	5,84	82,98	6,70
	2012	9,38	5,40	83,29	5,33
	2013	8,82	5,47	83,61	6,45
	2014	8,67	5,28	83,78	6,35

	2015	8,75	5,09	84,56	5,52
	2016	7,70	5,11	85,32	5,30
	2017	7,64	5,24	85,49	5,08
Kab. Pacitan	2011	18,13	6,29	62,03	1,54
	2012	17,29	6,33	62,94	1,02
	2013	16,73	5,87	63,38	0,99
	2014	16,18	5,20	63,81	1,08
	2015	16,68	5,10	64,92	0,97
	2016	15,49	5,21	65,74	1,00
	2017	15,42	4,98	66,51	0,85
Kab. Ponorogo	2011	12,29	5,70	65,28	6,79
	2012	11,76	5,98	66,16	3,14
	2013	11,92	5,14	67,03	3,25
	2014	11,53	5,21	67,40	3,66
	2015	11,91	5,25	68,16	3,68
	2016	11,75	5,29	68,93	3,94
	2017	11,39	5,10	69,26	3,76
Kab. Trenggalek	2011	14,90	5,94	64,27	3,27
	2012	14,21	6,22	65,01	2,98
	2013	13,56	6,00	65,76	4,04
	2014	13,10	5,28	66,16	4,20
	2015	13,39	5,03	67,25	2,46
	2016	13,24	5,00	67,78	3,07
	2017	12,96	5,02	68,10	3,48
Kab. Tulungagung	2011	9,90	6,37	67,76	3,56
	2012	9,40	6,47	68,29	3,10
	2013	9,07	6,13	69,30	2,71
	2014	8,75	5,46	69,49	2,42
	2015	8,57	4,99	70,07	3,95
	2016	8,23	5,02	70,82	3,60
	2017	8,04	5,08	71,24	2,27
Kab. Blitar	2011	11,29	5,43	65,47	3,91
	2012	10,74	5,62	66,17	2,82
	2013	10,57	5,06	66,49	3,64
	2014	10,22	5,02	66,88	3,08
	2015	9,97	5,06	68,13	2,79
	2016	9,88	5,08	68,88	2,92
	2017	9,80	5,07	69,33	2,99
Kab. Kediri	2011	14,44	6,03	66,84	8,33
	2012	13,71	6,11	67,29	4,08
	2013	13,23	5,82	68,01	4,65
	2014	12,77	5,32	68,44	4,91

	2015	12,91	4,88	68,91	5,02
	2016	12,72	5,02	69,87	5,44
	2017	12,25	4,90	70,47	3,18
Kab. Malang	2011	11,67	6,65	63,97	5,51
	2012	11,04	6,77	64,71	3,75
	2013	11,48	5,30	65,20	5,17
	2014	11,07	6,01	65,59	4,83
	2015	11,53	5,27	66,63	4,95
	2016	11,49	5,30	67,51	5,50
	2017	11,04	5,43	68,47	4,60
Kab. Lumajang	2011	13,01	6,20	60,72	3,16
	2012	12,40	6,00	61,31	4,60
	2013	12,14	5,58	61,87	2,01
	2014	11,75	5,32	62,33	2,83
	2015	11,52	4,62	63,02	2,60
	2016	11,22	4,70	63,74	1,71
	2017	10,87	5,05	64,23	2,91
Kab. Jember	2011	12,44	5,49	60,64	3,34
	2012	11,81	5,83	61,31	3,77
	2013	11,68	6,06	62,43	3,94
	2014	11,28	6,21	62,64	4,64
	2015	11,22	5,36	63,04	4,77
	2016	10,97	5,23	64,01	5,21
	2017	11,00	5,11	64,96	5,16
Kabupaten Banyuwangi	2011	10,47	6,95	65,48	6,06
	2012	9,97	7,24	66,12	3,41
	2013	9,61	6,71	66,74	4,65
	2014	9,29	5,72	67,31	7,17
	2015	9,17	6,01	68,08	2,55
	2016	8,79	5,38	69,00	4,43
	2017	8,64	5,45	69,64	3,07
Kab. Bondowoso	2011	16,66	6,07	60,46	3,01
	2012	15,81	6,09	62,24	3,60
	2013	15,29	5,81	63,21	2,04
	2014	14,76	5,05	63,43	3,72
	2015	14,96	4,95	63,95	1,75
	2016	15,00	4,97	64,52	1,81
	2017	14,54	5,03	64,75	2,09
Kab. Situbondo	2011	15,11	5,38	60,82	4,77
	2012	14,34	5,43	62,23	3,33
	2013	13,65	6,19	63,43	3,01
	2014	13,15	5,79	63,91	4,15

	2015	13,63	4,86	64,53	3,57
	2016	13,34	5,00	65,08	3,98
	2017	13,05	5,07	65,68	1,49
Kab. Probolinggo	2011	23,48	5,88	60,30	2,80
	2012	22,22	6,44	61,33	1,92
	2013	21,21	5,15	62,61	3,30
	2014	20,44	4,90	63,04	1,47
	2015	20,82	4,76	63,83	2,51
	2016	20,98	4,77	64,12	2,29
	2017	20,52	4,46	64,28	2,89
Kab. Pasuruan	2011	12,26	6,69	61,43	4,30
	2012	11,58	7,50	62,31	6,38
	2013	11,26	6,95	63,74	4,34
	2014	10,86	6,74	64,35	4,43
	2015	10,72	5,38	65,04	6,41
	2016	10,57	5,44	65,71	5,44
	2017	10,34	5,72	66,69	4,97
Kab. Sidoarjo	2011	6,97	7,04	74,48	8,65
	2012	6,44	7,26	75,14	5,37
	2013	6,72	6,89	76,39	4,12
	2014	6,40	6,44	76,78	3,88
	2015	6,44	5,24	77,43	6,30
	2016	6,39	5,51	78,17	5,56
	2017	6,23	5,80	78,70	4,97
Kab. Mojokerto	2011	11,38	6,61	68,71	6,79
	2012	10,71	7,26	69,17	3,35
	2013	10,99	6,56	69,84	3,16
	2014	10,56	6,45	70,22	3,81
	2015	10,57	5,65	70,85	4,05
	2016	10,61	5,49	71,38	4,29
	2017	10,19	5,74	72,36	5,00
Kab. Jombang	2011	12,88	5,96	66,84	6,58
	2012	12,23	6,15	67,82	6,72
	2013	11,17	5,93	68,63	5,59
	2014	10,80	5,42	69,07	4,39
	2015	10,79	5,36	69,59	6,11
	2016	10,70	5,40	70,03	4,95
	2017	10,48	5,36	70,88	5,14
Kab. Nganjuk	2011	13,88	5,75	66,58	6,31
	2012	13,22	5,85	68,07	4,09
	2013	13,60	5,40	68,98	4,73
	2014	13,14	5,10	69,59	3,93

	2015	12,69	5,18	69,90	2,10
	2016	12,25	5,29	70,50	2,01
	2017	11,98	5,26	70,69	3,23
Kab. Madiun	2011	14,37	6,02	65,98	4,96
	2012	13,70	6,12	67,32	3,99
	2013	12,45	5,67	68,07	4,63
	2014	12,04	5,34	68,60	3,38
	2015	12,54	5,26	69,39	6,99
	2016	12,69	5,27	69,67	6,69
	2017	12,28	5,42	70,27	3,19
Kab. Magetan	2011	12,01	5,64	68,52	3,95
	2012	11,50	5,79	69,56	3,64
	2013	12,19	5,85	69,86	2,96
	2014	11,80	5,10	70,29	4,28
	2015	11,35	5,17	71,39	6,05
	2016	11,03	5,31	71,94	6,36
	2017	10,48	5,09	72,60	3,80
Kab. Ngawi	2011	16,74	6,11	65,84	5,10
	2012	15,99	6,63	66,72	2,94
	2013	15,45	5,50	67,25	4,97
	2014	14,88	5,82	67,78	5,61
	2015	15,61	5,08	68,32	3,99
	2016	15,27	5,21	68,96	5,33
	2017	14,91	5,07	69,27	5,76
Kab. Bojonegoro	2011	17,47	10,39	63,22	5,70
	2012	16,66	3,77	64,20	3,42
	2013	16,02	2,37	64,85	5,81
	2014	15,48	2,29	65,27	3,21
	2015	15,71	17,42	66,17	5,01
	2016	14,60	21,95	66,73	4,91
	2017	14,34	10,26	67,28	3,64
Kab. Tuban	2011	18,78	6,84	62,47	3,69
	2012	17,84	6,29	63,36	4,13
	2013	17,23	5,85	64,14	4,30
	2014	16,64	5,47	64,58	3,63
	2015	17,08	4,89	65,52	3,03
	2016	17,14	4,90	66,19	2,78
	2017	16,87	5,00	66,77	3,39
Kab. Lamongan	2011	17,41	6,67	66,21	6,14
	2012	16,70	6,92	67,51	4,75
	2013	16,18	6,93	68,90	4,93
	2014	15,68	6,30	69,42	4,30

	2015	15,38	5,77	69,84	4,10
	2016	14,89	5,86	70,34	3,88
	2017	14,42	5,52	71,11	4,12
Kab. Gresik	2011	15,33	6,48	71,11	5,93
	2012	14,35	6,92	72,12	6,78
	2013	13,94	6,05	72,47	4,55
	2014	13,41	7,04	72,84	5,06
	2015	13,63	6,61	73,57	5,67
	2016	13,19	5,49	74,46	4,81
	2017	12,80	5,83	74,84	4,54
Kab. Bangkalan	2011	26,22	3,31	58,63	6,37
	2012	24,70	-1,42	59,65	5,13
	2013	23,23	0,19	60,19	6,78
	2014	22,38	7,19	60,71	5,68
	2015	22,57	-2,66	61,49	5,00
	2016	21,41	0,66	62,06	5,28
	2017	21,32	3,53	62,30	4,48
Kab. Sampang	2011	30,21	2,50	55,17	2,13
	2012	27,97	5,77	55,78	1,71
	2013	27,08	6,53	56,45	4,68
	2014	25,80	0,08	56,98	2,22
	2015	25,69	2,08	58,18	2,51
	2016	24,11	6,17	59,09	2,77
	2017	23,56	4,69	59,90	2,48
Kab. Pamekasan	2011	20,94	6,22	60,42	2,61
	2012	19,61	6,25	61,21	2,29
	2013	18,53	6,10	62,27	2,17
	2014	17,74	5,62	62,66	2,14
	2015	17,41	5,32	63,10	4,26
	2016	16,70	5,35	63,98	4,19
	2017	16,00	5,04	64,93	3,91
Kab. Sumenep	2011	23,10	6,13	58,70	1,99
	2012	21,96	9,96	60,08	1,14
	2013	21,22	14,45	60,84	2,56
	2014	20,49	6,23	61,43	1,01
	2015	20,20	1,27	62,38	2,07
	2016	20,09	2,58	63,42	2,00
	2017	19,62	2,86	64,28	1,83
Kota Kediri	2011	8,63	4,29	72,93	9,69
	2012	8,14	5,27	73,66	8,12
	2013	8,23	3,52	74,18	7,92
	2014	7,95	5,85	74,62	7,66



	2015	8,51	5,36	75,67	8,46
	2016	8,40	5,54	76,33	8,22
	2017	8,49	5,14	77,13	4,68
Kota Blitar	2011	7,12	6,42	73,08	5,24
	2012	6,75	6,52	73,53	3,68
	2013	7,42	6,49	74,53	6,17
	2014	7,15	5,88	75,26	5,71
	2015	7,29	5,68	76,00	3,80
	2016	7,18	5,76	76,71	4,81
	2017	8,03	5,78	77,10	3,76
Kota Malang	2011	5,50	6,04	77,36	9,74
	2012	5,21	6,26	78,04	7,96
	2013	4,87	6,20	78,44	7,73
	2014	4,80	5,80	78,96	7,22
	2015	4,60	5,61	80,05	7,28
	2016	4,33	5,61	80,46	6,91
	2017	4,17	5,69	80,65	7,22
Kota Probolinggo	2011	17,74	5,95	68,14	5,46
	2012	10,92	6,49	68,93	5,26
	2013	8,55	6,47	70,05	4,48
	2014	8,37	5,93	70,49	5,16
	2015	8,17	5,86	71,01	4,01
	2016	7,97	5,88	71,50	3,96
	2017	7,84	5,88	72,09	3,42
Kota Pasuruan	2011	8,39	6,28	70,41	6,22
	2012	7,90	6,31	72,01	4,54
	2013	7,60	6,51	72,89	5,41
	2014	7,34	5,71	73,23	6,09
	2015	7,47	5,52	73,78	5,57
	2016	7,62	5,46	74,11	6,35
	2017	7,53	5,47	74,39	4,64
Kota Mojokerto	2011	6,89	5,97	73,47	10,59
	2012	6,48	6,09	74,2	7,52
	2013	6,65	6,20	74,91	5,73
	2014	6,42	5,83	75,04	4,42
	2015	6,16	5,74	75,54	4,88
	2016	5,73	5,77	76,38	3,33
	2017	5,73	5,65	76,77	3,61
Kota Madiun	2011	5,66	6,79	76,48	10,62
	2012	5,37	6,83	77,21	6,89
	2013	5,02	7,68	78,41	6,57
	2014	4,86	6,62	78,81	6,93

	2015	4,89	6,15	79,48	5,10
	2016	5,16	5,90	80,01	5,12
	2017	4,94	5,93	80,13	4,26
Kota Surabaya	2011	6,58	7,13	77,62	7,81
	2012	6,25	7,35	78,05	5,27
	2013	6,00	7,58	78,51	5,32
	2014	5,79	6,96	78,87	5,82
	2015	5,82	5,97	79,47	7,01
	2016	5,63	6,00	80,38	7,29
	2017	5,39	6,13	81,07	5,98
Kota Batu	2011	4,74	7,13	69,76	4,82
	2012	4,47	7,26	70,62	3,51
	2013	4,77	7,29	71,55	2,30
	2014	4,59	6,90	71,89	2,43
	2015	4,71	6,69	72,62	4,29
	2016	4,48	6,61	73,57	3,75
	2017	4,31	6,56	74,26	2,26
Kab. Pandeglang	2011	9,80	5,74	59,92	11,32
	2012	9,28	5,81	60,48	9,30
	2013	10,25	4,72	61,35	12,34
	2014	9,50	4,93	62,06	7,03
	2015	10,43	5,96	62,72	10,22
	2016	9,67	5,49	63,40	9,26
	2017	9,74	6,05	63,82	8,30
Kab. Lebak	2011	9,20	5,99	59,82	12,10
	2012	8,63	5,11	60,22	9,07
	2013	9,50	6,30	61,13	7,23
	2014	9,17	5,83	61,64	9,57
	2015	9,97	5,80	62,03	11,00
	2016	8,71	5,70	62,78	10,00
	2017	8,64	6,05	62,95	9,00
Kab. Tangerang	2011	6,42	6,75	68,45	14,42
	2012	5,71	6,17	68,83	11,46
	2013	5,78	6,41	69,28	11,94
	2014	5,26	5,37	69,57	8,45
	2015	5,71	5,36	70,05	9,00
	2016	5,29	5,32	70,44	9,79
	2017	5,39	5,84	70,97	10,57
Kab. Serang	2011	5,63	6,10	61,97	13,29
	2012	5,28	5,42	62,97	12,96
	2013	5,02	6,04	63,57	13,69
	2014	4,87	5,39	63,97	14,76

	2015	5,09	5,02	64,61	14,80
	2016	4,58	5,00	65,12	13,90
	2017	4,63	5,21	65,60	13,00
Kota Tangerang	2011	6,14	7,39	74,15	12,89
	2012	5,56	7,07	74,57	8,31
	2013	5,26	6,52	75,04	8,62
	2014	4,91	5,15	75,87	7,81
	2015	5,04	5,37	76,08	8,00
	2016	4,94	5,30	76,81	7,58
	2017	4,95	5,91	77,01	7,16
Kota Cilegon	2011	3,98	6,62	69,26	13,14
	2012	3,82	7,70	70,07	11,31
	2013	3,99	6,69	70,99	7,16
	2014	3,81	4,62	71,57	11,83
	2015	4,10	4,78	71,81	12,00
	2016	3,57	5,05	72,04	11,94
	2017	3,52	5,59	72,29	11,88
Kota Serang	2011	6,25	8,34	68,69	13,84
	2012	5,70	7,42	69,43	10,80
	2013	5,92	7,30	69,69	11,29
	2014	5,70	6,86	70,26	10,03
	2015	6,28	6,29	70,51	9,49
	2016	5,58	6,22	71,09	8,96
	2017	5,57	6,41	71,31	8,43
Kota Tangerang Selatan	2011	1,50	8,81	76,99	11,98
	2012	1,33	8,66	77,68	8,07
	2013	1,75	8,75	78,65	4,56
	2014	1,68	8,05	79,17	6,92
	2015	1,69	7,20	79,38	6,13
	2016	1,67	6,98	80,11	6,48
	2017	1,76	7,43	80,84	6,83

Sumber: \*) Badan Pusat Statistik, 2018 (data diolah);

\*\*) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018 (data diolah);

\*\*\*) Dan berbagai sumber lain, 2018 (data diolah).